

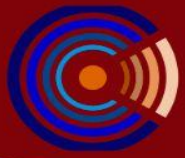


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA DENPASAR**

2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia, baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah system yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sector pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 3 Pebruari 2025

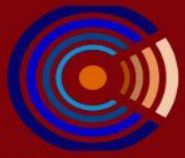
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar.



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

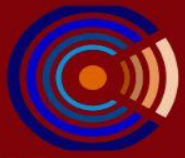
Pembina Utama Muda

Nip. 197801281996121003



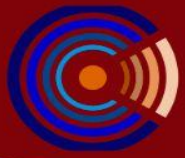
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Isu Strategik	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Target dan Analisis Target Renstra	13
3.2 Capaian Kinerja	14
3.3 Analisis Capaian Kinerja	17
3.4 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan	28
3.5 Penghargaan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar	89
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Simpulan	93
4.2 Saran	93



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Target Renstra Dinas Kominfos Kota Denpasar 2021-2026
- Tabel 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- Tabel 3. PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- Tabel 4. Kebijakan Internal SPBE
- Tabel 5. Manajemen SPBE
- Tabel 6. Layanan SPBE
- Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024
- Tabel 8. Aplikasi Prangkat Daerah Kota Denpasar



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2024 merupakan tahun ke lima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar melalui indikator sasaran, program dan kegiatan.

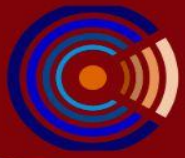
Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE
2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE
4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi, adapun Program kegiatan tersebut adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota..
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.



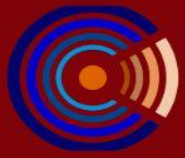


- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Kegiatan Pengelolaan Informai dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 3. Program Aplikasi Informatika
 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penyedian Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, pada tahun 2024 ini ditetapkan 4 sasaran dengan 5 Program dan 18 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA





2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

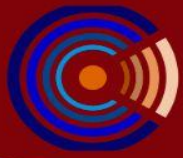
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
 - e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan



- b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

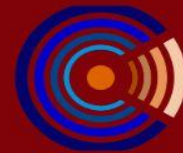
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dengan rata-rata tingkat capaian di atas 95% atau dapat dikategorikan baik sekali. Keberhasilan ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-tahun mendatang telah dipersiapkan strategi-strategi untuk selalu memperoleh hasil capaian kinerja yang semakin baik



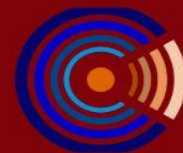
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi Informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah terbukti mampu menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel. Selain itu dengan adanya TIK, interaksi antara Pemerintah dengan Masyarakat lebih baik dan lebih aktif. Hal ini merupakan fungsi TIK sebagai pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan khususnya di Kota Denpasar yang lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia telah memberikan prioritas pada pengembangan e-Government sejak tahun 2003. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment. Namun umumnya pengembangan e-Government baik di level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah belum sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga perencanaan mulai dari rencana induk pengembangan, rencana strategi, sampai dengan rencana kinerja sangat penting disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih memperkuat hal tersebut maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tentang Tata Kelola, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE dan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Serta khusus Peraturan Menteri PANRB No 5 Tahun 2018 untuk Pedoman Evaluasi SPBE yg digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Peraturan tentang SPBE, maka pemangku kebijakan Pemerintah Kota Denpasar akan lebih terbantu untuk menciptakan program-program maupun kegiatan-kegiatan publik lebih cepat dan tepat sasaran. Serta evaluasi dan monitoring mampu dilaksanakan secara transparan dan cepat dengan bantuan





peran aktif dari masyarakat. Implementasi TIK sebagai salah satu komponen penting dari e-government Pemerintah Kota Denpasar wajib direncanakan dan dirancang dengan baik agar visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar bisa terwujud. Selain itu implementasi SPBE perlu diukur keberhasilannya berdasarkan sumber daya yang dikeluarkan dan output serta dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

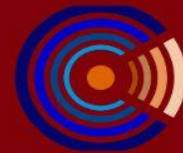
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);





8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan





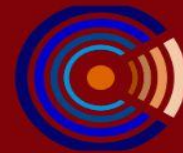
- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 19. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dituangkan ke dalam Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada terwujudnya Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.





1.4 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

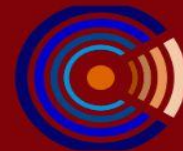
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mendapat beberapa tantangan / masalah yang harus dihadapi dalam meningkatkan pelayanan public. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun **Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar** adalah :

- **Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah;**
- **Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah;**
- **Privasi data dan informasi;**
- **Keterbukaan informasi publik;**
- **Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan.**

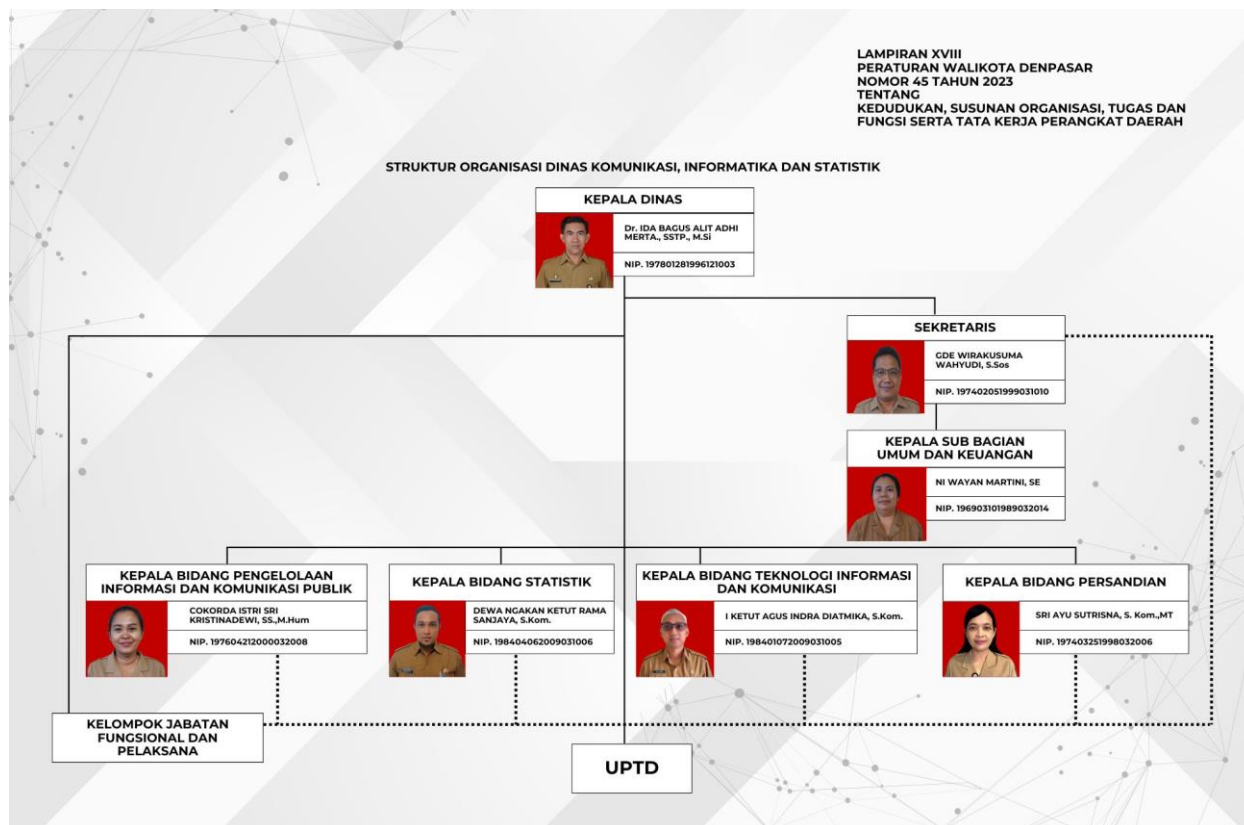
1.5 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

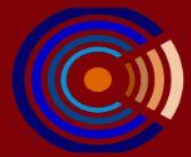
Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan





Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehubungan dengan itu maka ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



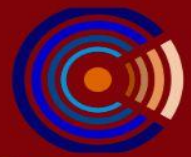


Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.
- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Statistik;
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. Bidang Persandian;
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



1.6 Sistematika Penulisan

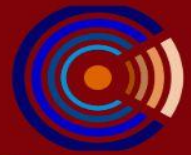
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Isu Strategik, Struktur Organisasi dan sistematika LKjIP Tahun 2024.

BAB II – Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi, Analisa dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

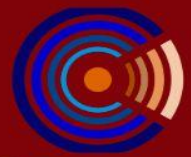
Arah pembangunan lima tahun termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD Tahun 2021–2026 merupakan bagian dari tahapan keempat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005–2025 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang harus disusun setelah RPJMD ditetapkan.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil walikota Kota Denpasar periode 2021-2026 yaitu: "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**" Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota Denpasar yaitu pada Misi IV "**Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana**". Dalam kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) dan Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Misi, Tujuan, Sasaran* serta *Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan,



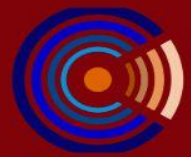
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun 2024. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Denpasar secara sinergis, terarah dan terencana untuk mewujudkan masyarakat damai dan sejahtera maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasarannya, yaitu : Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dan harus selaras dengan misi organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi,

sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun



2024 adalah sebagai berikut :

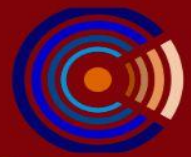
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		Indeks SPBE				
		Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3,00	3,20	3,40	3,60
		Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3,30	3,45	3,60	3,75
		Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2,18	2,40	2,60	2,80
		Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3,55	3,65	3,75	3,85

Sesuai tabel tersebut diatas yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra merupakan suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi dinas, akan terlihat di dalam Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselerasi dan mendorong pembangunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan tugas pokok merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem e-government Kota Denpasar. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut: **”OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)”**, dengan indicator tujuan adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE**
2. **Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE**
3. **Meningkatnya kematangan manajemen SPBE**
4. **Meningkatnya kematangan layanan SPBE**



2.1.3. Indikator dan Target Kinerja

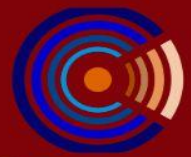
Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan bagian utama dalam sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai visi dan misi. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar merupakan indikator kinerja pada tingkat outcome yang menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan organisasi. Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Adapun Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 yang merupakan Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahun Bersangkutan adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		Indeks SPBE		
		Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	Nilai	3.60
		Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	Nilai	3.75
		Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	Nilai	2.80
		Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	Nilai	3.85

2.1.4. Program

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI



2.1.5. Kegiatan/Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar adalah:

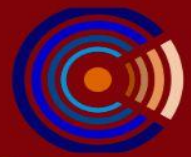
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
 - e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas





PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

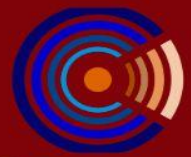
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar membuat perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2021 – 2026. PK dimaksud yang berisikan sasaran dan indicator kinerja serta satuan target yang dilaksanakan pada tahun yang berjalan yaitu tahun 2024 yaitu :

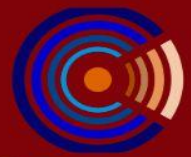
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
Nilai Indeks SPBE	Nilai indeks domain SPBE	Nilai

Sebagaimana yang telah direview dari Tim Bappeda Kota Denpasar dimana Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kominfos Kota Denpasar pada sasaran nya adalah Nilai Indeks SPBE, namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja di evaluasi lagi dari tim Menpan RB disarankan untuk menyesuaikan sasaran nya agar menyesuaikan dengan sasaran Renstra yang berlaku, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Kominfos menyesuaikan lagi dengan sasaran yang ada di Renstra yaitu 4 (empat) sasaran strategis.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (OUTCOME) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup OUTCOME yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan



- sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah.
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Denpasar, 19 Agustus 2024

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

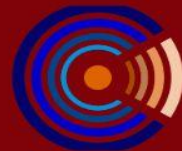
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 197801281996121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2.80
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85

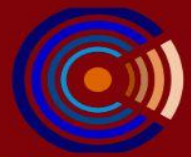
NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.806.940.352	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	979.747.000	
3	Program Aplikasi Informatika	4.087.111.000	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.975.000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	130.400.000	
		19.120.173.352	

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara

Denpasar, 19 Agustus 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 197801281996121003



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TARGET DAN ANALISIS TARGET RENSTRA 2021-2026

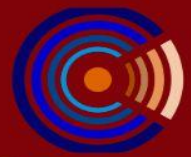
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1
Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2021 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kematangan kebijakan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3.60	3,80	4.00	4.00
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	-	3,30	3,45	3.60	3.75	3,90	4.05	4.05
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.20
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.05

Dalam menentukan target Renstra digunakan formulasi pencapaian nilai pembobotan masing-masing indikator yaitu :

1. Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2. Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3. Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4. Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE



Jika target pada Renstra ditafsirkan sebagai target nilai indeks maksimal pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan Target Renstra per tahun. Dari Tabel diatas dapat dilihat :

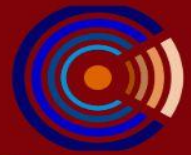
- Indikator Kinerja pada Renstra ada 4 (empat) Indikator yang memiliki kenaikan target yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE)
 2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE (formulasi Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE)
 3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE)
 4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE)

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

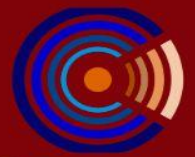


Tabel 2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR PERIODE 2021- 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Thn 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE		3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00	Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE		3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE		2,18	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20	Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE		3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE

Tabel 3.
PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	TARGET s/d 2024	REALISASI s/d 2024
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60	4,10
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75	3,90
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks Manajemen SPBE	2.80	3,27
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85	4,20



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

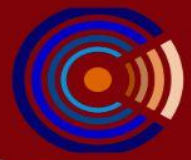
No	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tujuan Diskominfo / Capaian Kinerja Daerah Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	2024		% CAPAIAN	Kriteria/Kode
			TARGET	REALISASI		
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.85	3.96	102.85%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	KRITERIA/KODE
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60	4,10	113.89%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75	3,90	104%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks Manajemen SPBE	2.80	3,27	116.78%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85	4,20	109%	Sangat Tinggi



Dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengampu 4 (empat) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja;
2. Dari keempat sasaran tersebut semuanya telah memenuhi target
3. Faktor keberhasilan keempat indikator kinerja salah satunya adalah komitmen serta dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan SPBE.
4. Berdasarkan hal tersebut terkait Skala Nilai Peringkat Kinerja, capaian keempat sasaran tersebut masuk kategori “Sangat Tinggi”, karena capaian kinerja melebihi 100%.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada Bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Penghitungan capaian Kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja dalam pencapaian capaian kinerja.

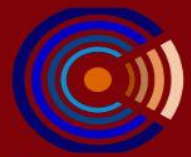
1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE,
dengan indikator : Nilai Indeks kebijakan SPBE

- a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks kebijakan SPBE, dalam penerapannya dilakukan melalui aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE dimana indikatornya terdiri dari :

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
4. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK
10. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”**Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE**” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:

Tabel 4.
Kebijakan Internal SPBE

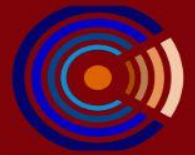
	No.	Indikator	Penilaian Mandiri 2024	Nilai Tingkat Kematangan Tahun 2024
DOMAIN KEBIJAKAN		1. ASPEK KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT TATA KELOLA SPBE		
	1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
	2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
	3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	5
	4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5
	5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	5
	6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3
	7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3
	8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4	4
	9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	3	

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

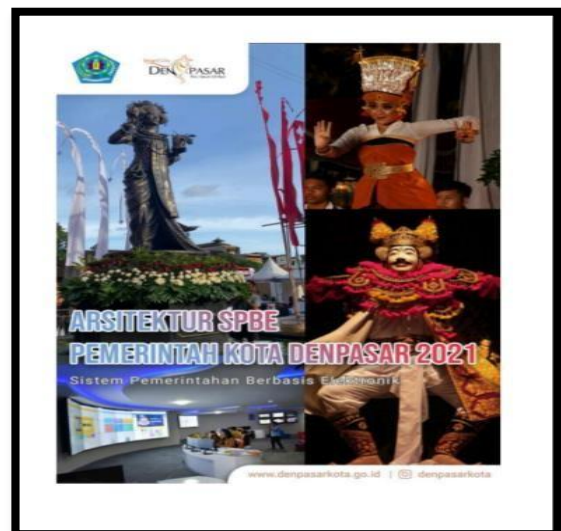
Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu:

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

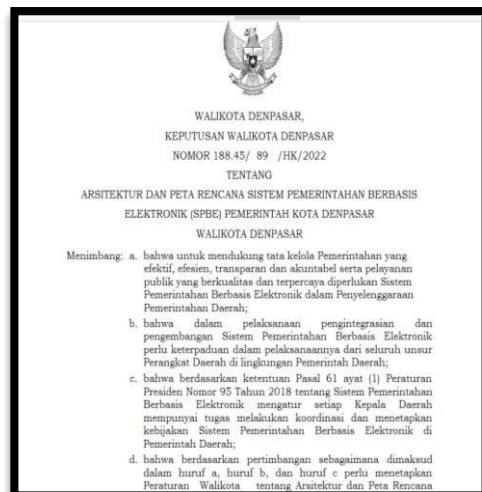
IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD. Secara periodik sudah dilakukan reuiu dan evaluasi :



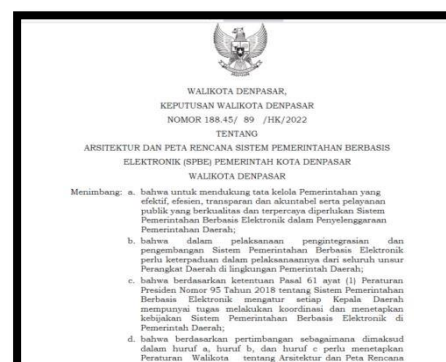
- Konteks pengaturan sudah memiliki uraian referensi Arsitektur SPBE dan enam domain Arsitektur SPBE, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD.
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau permasalahan, rekomendasi/tindak lanjut)

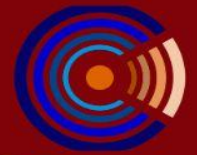


2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data





6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

KEPADA:
Tn. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

DEKAS:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

DEKAS:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

DEKAS:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

DEKAS:
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

STANDARISASI INFRASTRUKTUR JARINGAN TK

- Pendahuluan**
Infrastruktur TK adalah semua perangkat keras dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Selain itu, infrastruktur TK juga mencakup aspek data, sistem perhubungan layanan pemerintah berbasis atau sharing system, dan jaringan intra pemerintah.
- Gambaran Umum**
 - 2.1 Perancangan Jaringan TK**
Jaringan Infrastruktur TK menggunakan fiber optic sebagai backbone yang menghubungkan seluruh unit perangkat teja dan dikelola oleh unit kerja pengelola TK.
 - 2.2 Konfigurasi Setting Perangkat ASIS**
 - Konfigurasi dan setting perangkat asis yang terpasang (router, switch manageable, wifi akses point, dll) dilakukan oleh unit pengelola TK.
 - Integrasi jaringan internal OPD ke Jaringan intranet Pemkot melalui perangkat router Dinas Kominfo yang terpasang di OPD.
 - Unit perangkat daerah yang akan melaksanakan instalasi mandiri agar senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
 - 3 Penguji Koneksi Jaringan TK**
 - Penguji koneksi dilaksanakan secara periodic atau berdasarkan pengaduan terhadap seluruh/beberapa titik akses yang terpasang baik media kabel maupun nirkabel (wifi), serta melakukan tes kecepatan dan stabilitas akses internet/intranet apakah sudah sesuai dengan perancangan sistem.
 - 4 Back Up Konfigurasi**
 - Konfigurasi/setting yang dilakukan di router perhubungan (Dinas Kominfo) dan router internal OPD selalu di-backup sebelum dan sesudah dilakukan perubahan.
 - 5 Regulasi**
 - Mengacu pada Perwali No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
 - 6 Maintenance**
 - Pengelolaan, pemeliharaan, backup dan keamanan jaringan di internal OPD merupakan tanggungjawab OPD masing-masing dan bisa berkoordinasi dengan tim teknis Dinas Kominfo melalui sistem pendukung jaringan Denpasarkota.

7. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Masing-masing perangkat daerah diharapkan memiliki SDM, mencantumkan kontak person SDM Teknis, SDM ASIS dan bertanggung dengan Giat pengakuan jaringan.

7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

STANDARISASI INTEGRASI SISTEM INFORMASI

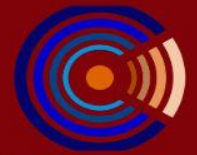
- Pendahuluan**
Integrasi Sistem Informasi sebagai alat atau jembatan penggabungan beberapa sistem sebagai pertukaran data untuk kebutuhan efisien dan efektifitas suatu proses kerja, jika prosedur tidak dilaksanakan dengan sesuai maka ada beberapa tahapan integrasi yang akan gagal.
- Dampak Positif**
Ada beberapa hal yang merupakan dampak positif jika melakukan integrasi sistem informasi yaitu:
 - Mengurangi waktu dan biaya untuk berbagi pakai data/informasi antar sistem elektronik.
 - Mengurangi waktu dan biaya dalam memberikan pelayanan.
 - Mempromosikan koordinasi antar lembaga.
 - Mengurangi jumlah tumpang tindih data antar sistem.
 - Meningkatkan pemerintah memberikan layanan terintegrasi kepada masyarakat.
 - Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
 - Meningkatkan kinerja pegawai pemerintah.
 - Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
- Dampak Negatif**
Dan berikut adalah beberapa hal jika pengembangan sistem informasi tidak menerapkan integrasi/interoperabilitas:
 - Banyak ragam layanan aplikasi TK pemerintah yang sama fungsi dan menggunakan masyarakat.
 - Banyak aplikasi TK dibangun dan dikembangkan pemerintah hanya untuk kejar target tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya.
 - Pengelolaan aplikasi TK pemerintah tidak terencana sehingga tidak ter-manfaatkan dengan optimal.
 - Terjadi duplikasi data (redundancy) pada tiap aplikasi TK pemerintah yang tidak terjamin keamanannya.
 - Penggunaan anggaran yang sia-sia dan membengkaknya kebutuhan operasional.

2. Model Integrasi
Sebagai tolak standar model integrasi yang distandardisasikan untuk diterapkan dalam pengembangan sistem informasi, untuk penggunaan model integrasi disesuaikan dengan kebutuhan.

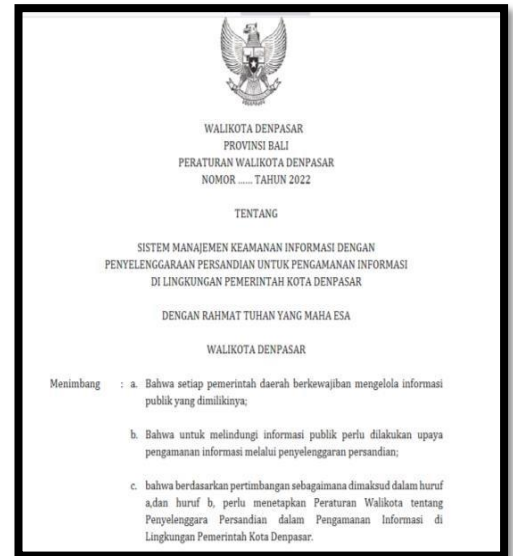
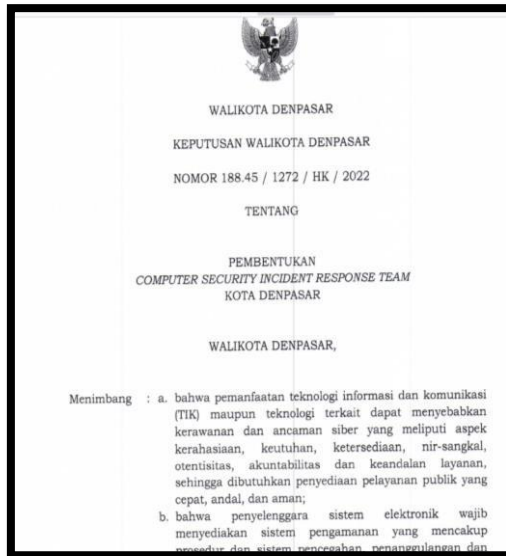
Model 1. Integrated User Interface
Menempatkan antarmuka aplikasi web ke dalam halaman utama portal. Model ini adalah model integrasi yang paling mudah dilakukan karena hanya meng-embed aplikasi lain ke aplikasi lainnya.

Model 2. Integrated Access With Authentication
Menyediakan Hyperlink aplikasi web ke dalam portal sebagai metode satu identifikasi. Model ini menggunakan portal yang memiliki sistem autentikasi mengharuskan user login untuk masuk ke aplikasi lainnya, jadi hanya menggunakan satu aplikasi saja.

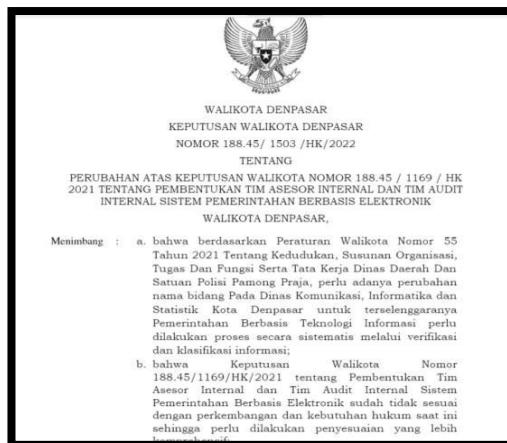
Model 3. Integrated Script/Data using Distributed API
Berbagi pakai data melalui API (Application Programming Interface) Model ini paling diskompleksitas karena pengembalian datanya yang lebih terstruktur dan dapat dipakai oleh berbagai platform aplikasi. Dan di model ini terjadi pertukaran data antar dua aplikasi dibandingkan dua model sebelumnya.



8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

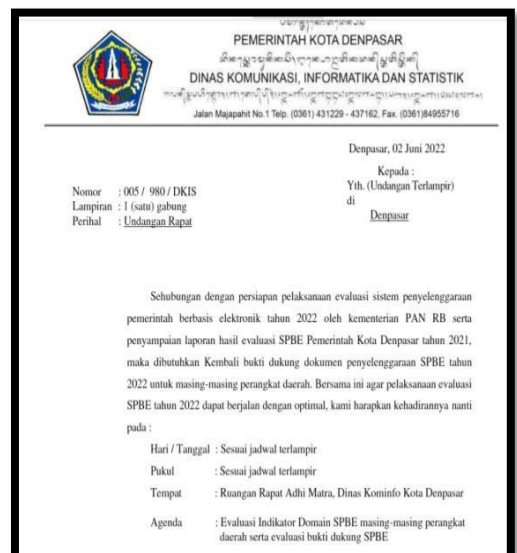
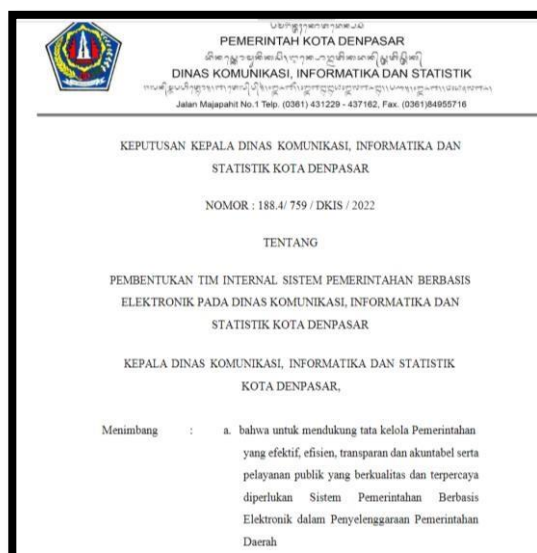


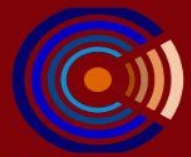
9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK



10. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE,
dengan indikator : Nilai Indeks Tata Kelola SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Tata Kelola SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Tata Kelola SPBE, dalam penerapannya dilakukan melalui aspek Perencanaan Strategis, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek Penyelenggaraan SPBE dimana indikatornya terdiri dari :

1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE

- a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- c. Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE
- d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

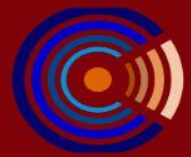
- a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
- b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
- c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE

- a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan Penyelenggaraan tata kelola SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”**Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE**” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:



	No	Indikator	Penilaian Mandiri 2024	Nilai Tingkat Kematangan 2024	
DOMAIN TATA KELOLA		1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE			
	1	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	3	
	2	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	4	
	3	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5	1	
	4	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5	4	
		2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
	1	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4	5	
	2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5	5	
	3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5	
	4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	3	
		3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE			
		1	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	4
		2	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4	5

C.

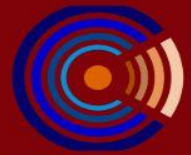
Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek Perencanaan Strategis, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek Penyelenggaraan SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu:

1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE

a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Intansi Pusat/Pemerintah Daerah

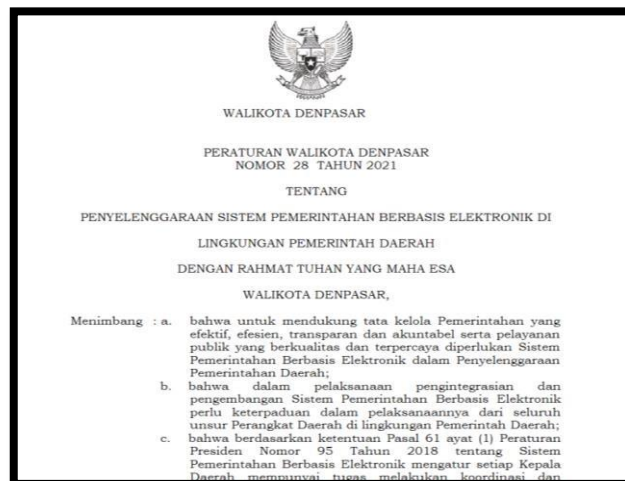




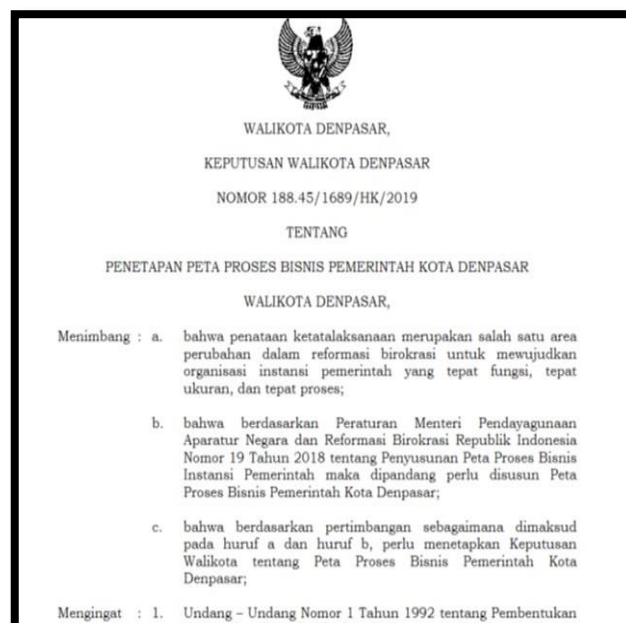
b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

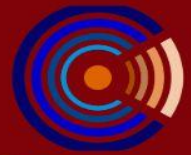


c. Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE



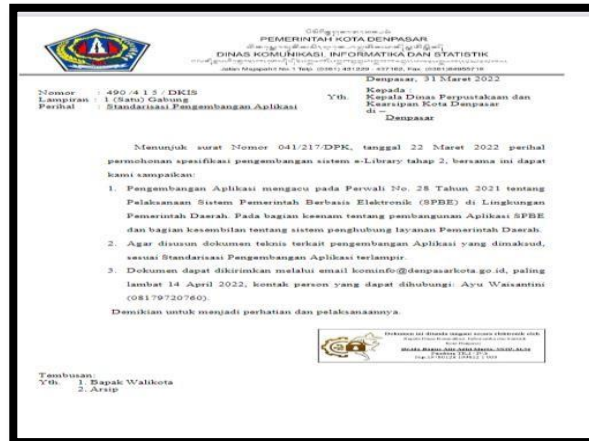
d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE



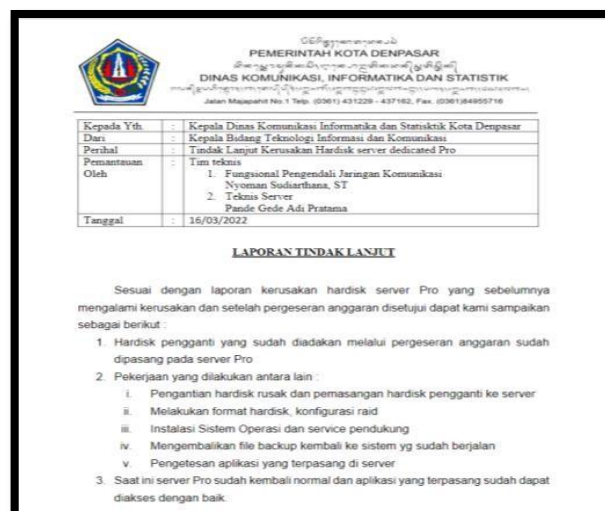


2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

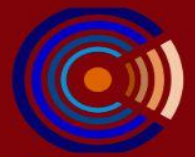


b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

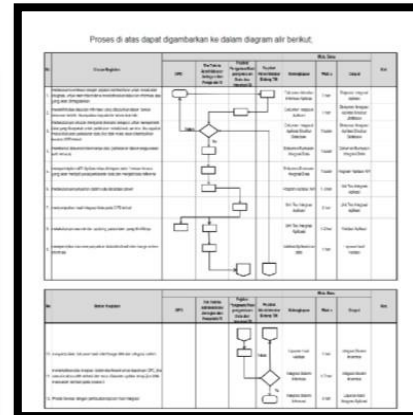
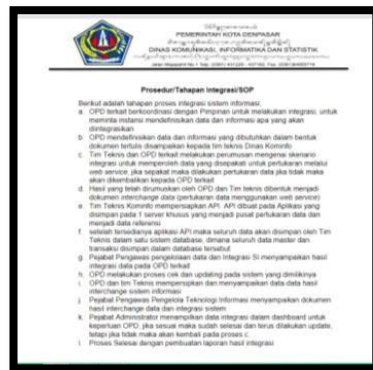


c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



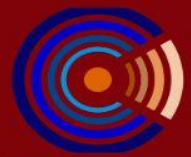
3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE

a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE





3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE, dengan indikator: Nilai Indeks Manajemen SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Manajemen SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Manajemen SPBE, dalam penerapannya dilakukan melalui aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK dimana indikatornya terdiri dari :

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

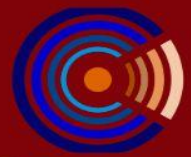
- a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
- b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
- d. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
- e. Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- f. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
- g. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
- h. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

2. ASPEK AUDIT TIK

- a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
- c. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan manajemen SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”**Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE**” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:



Tabel 5
Manajemen SPBE

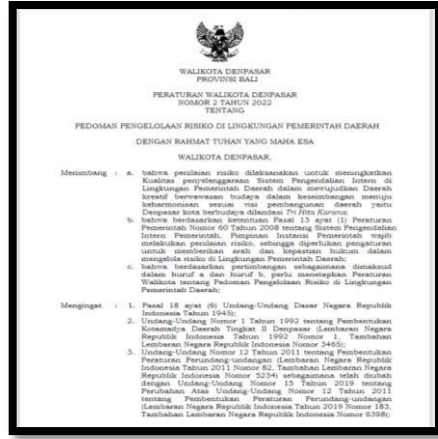
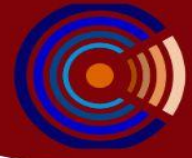
	No.	Indikator	Penilaian Mandiri 2024	Nilai Tingkat Kematangan 2024	
DOMAIN MANAJEMEN		1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE			
	1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4	5	
	2	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4	2	
	3	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	4	
	4	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	4	5	
	5	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4	4	
	6	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3	2	
	7	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3	3	
	8	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	3	
			2. ASPEK AUDIT TIK		
		1	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	4	3
		2	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	4	3
		3	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	5	2

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu:

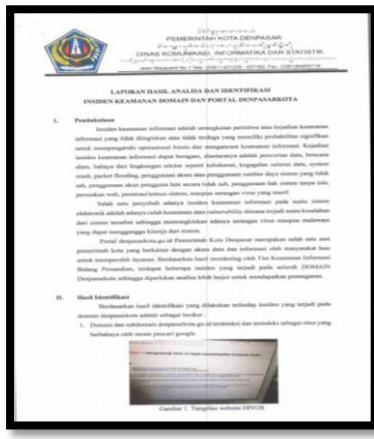
1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE

a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE



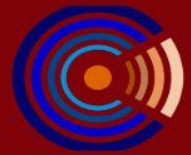
PETA TAPAK KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD			
1	Nata Ponda	Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali	
2	Tahun Perencanaan	2022	
3	Periode yang direncanakan	Periode RPJMD Tahun 2021-2025	
4	Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Ditunjuk	Bidang Komunikasi dan Informatika	
5	Sumber Data	RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2025	
6	Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
7	Sasaran Strategis	1. Meningkatkan keterbukaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	
8	KU Rencana OPD	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Target
9		2. Indeks Keamanan-Informasi	11 Laporan
10		3. Capaian Keterbukaan Informasi Publik	75%
11	Program	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	
12		2. Program Aplikasi Informatika	
13		3. Program Penyelenggaraan Perencanaan Umum, Perencanaan Informasi	
14		4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
15	Tahun, Satuan, dan Jenis Program yang akan dilaksanakan	Tahun anggaran: Mengantia Daya Tangap Daerah	
16	Sasaran Strategis	1. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
17	RU Strategic	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
18	Program	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	
19		2. Program Aplikasi Informatika	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi



c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK





2. ASPEK AUDIT TIK

a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE



b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE



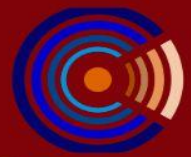
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE, dengan indikator : Nilai Indeks layanan SPBE

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan)

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Layanan SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Layanan SPBE, dalam penerapannya dilakukan melalui aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana indikatornya terdiri dari :

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
- Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
- Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
- Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa



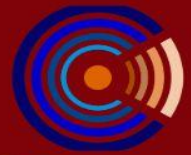
- e. Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
- f. Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
- g. Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- h. Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
- i. Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- j. Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

- a. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- b. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
- c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- d. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
- e. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
- f. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

b. Instrumen / cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan Layann SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”**Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE**” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut:



Tabel 6
Layanan SPBE

	No.	Indikator	Penilaian Mandiri 2024	Nilai Tingkat Kematangan 2024	
DOMAIN LAYANAN		1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK			
	1	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5	4	
	2	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3	4	
	3	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3	4	
	4	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5	4	
	5	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5	4	
	6	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	4	
	7	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3	3	
	8	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	4	
	9	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4	
	10	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5	4	
			2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK		
	1	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5	4	
	2	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	4	
	3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3	5	
	4	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5	5	
	5	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	5	
	6	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5	5	

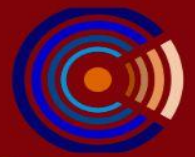
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2024, aspek aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu:

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

a. Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan





Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Berdasarkan hasil pemantauan Menpan RB tersebut nilai indeks Pemerintah Kota Denpasar dengan domain kebijakan SPBE adalah 4,10, domain tata kelola SPBE adalah 3,90, domain manajemen SPBE adalah 3,27 domain layanan SPBE adalah 4,20, dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 3.96 (102.85%) dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil pencapaian indeks domain tersebut merupakan salah satu kontribusi dalam pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Denpasar yang menjadi indikator tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar,serta masuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) Walikota Denpasar. Nilai Indeks SPBE hasil pemantauan Menpan RB yaitu 3.96 dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021-2026, target indeks SPBE sebesar 3.85 (tahun 2024) sehingga untuk capaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan salah satu sasaran dari RPJMD Kota Denpasar telah memenuhi target.

Pencapaian Indikator Tujuan Diskominfo / Indikator Sasaran RPJMD Kota Denpasar

No	Indikator Tujuan Diskominfos / Indikator Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks SPBE	3.85	3.96	102.85%

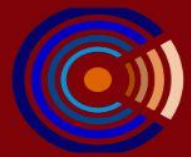
Dari table tersebut dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan SPBE di Kota Denpasar dengan indicator Indeks SPBE yaitu :

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE ,Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra , Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Indikator 1-10)

□ Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE , Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 1,2,3,4,5,8) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, dibuktikan dengan adanya KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 188.45/ 89 /HK/2022 TENTANG ARSITEKTUR DAN ETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Peta



Rencana SPBE. Kebijakan Internal Manajemen Data dan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE serta Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi pada Pemerintah Kota Denpasar, diatur dalam PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Arsitektur SPBE , Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 11,12,14)

Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 12-14) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Peta Rencana SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Peta Rencana SPBE. Serta Inovasi Proses Bisnis SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen proses bisnis yang sudah dimutakhirkan.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih belum memiliki dokumen keterpaduan rencana dan anggaran, dimana tidak ditemukan adanya dokumen keterpaduan rencana dan anggaran atau bukti dukung yang disampaikan.

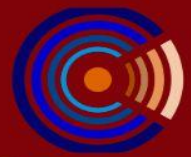
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra , penggunaan sistem penghubung layanan (Indikator 15,16,17,18)

Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra (Indikator 15,16,17) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan

adanya Laporan_Monitoring_Evaluasi_Aplikasi, Alur_SOP_Sistem_WBS, Dokumen_Panduan_Use_WBS_Dokumen_Perancangan_Sistem_BS_Inspektorat, Laporan_penandatanganan_BA_penghapusan_subdomain_dan_hosting, Standarisasi_Aplikasi dan lain-lain. Layanan Pusat Data pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen pusat data berupa SOP



Layanan Data Center, Dokumen Kredensial serta Tindak Lanjut Maintenance Pusat Data. Layanan Jaringan Intra pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen jaringan intra sesuai data dukung : Laporan Monev Jaringan, Topologi jaringan, Laporan Link VPN dan lain-lain.

Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya pelaksanaan tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE (Indikator 19-20)

Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya pelaksanaan tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE (Indikator 19-20) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar . Pelaksanaan tim koordinasi SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Evaluasi SPBE Internal, Surat_Undangan_FGD SPBE, Notulen Rapat Final PM, Laporan PM SPBE_2024, SK Tim Evaluator SPBE, SK Tim Pengarah_SPBE 2019, Notulen Rapat Persiapan Interviu SPBE 2021 dan lain-lain. Kolaborasi penerapan SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen peta jalan, PERJANJIAN_KERJASAMA BAPENDA DENGAN BPD 2020, Surat Undangan Pembahasan Pagi Denpasar, Notulen rapat pembahasan grand design, Grand Design Aplikasi On Boardin Pelayanan, dan lain-lain.

Kelemahan

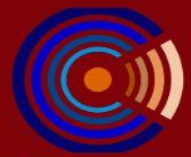
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE (Indikator 21-28)

Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, (Indikator 21,23,24, 25) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Penerapan Manajemen Resiko SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwali Nomer 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko, Dokumen Manajemen Resiko SPBE,



Penetapan Resiko Strategis, Identifikasi Resiko Strategis, Hasil Analisis Resiko, dan Matriks Analisis Resiko. Penerapan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Perwali Kota Denpasar No 73 Th 2019 Tentang Satu Data Daerah, Laporan Forum Data, LAPORAN PELAKSANAAN PERWALI, Surat undangan Forum Satu Data dan lain-lain. Penerapan Manajemen Aset TIK dibuktikan dengan adanya Pakta Integritas Aset TIK SOP Penghapusan Aset dan SOP Pengelolaan Aset. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan adanya Analisis_Kebutuhan_Diklat,Uraian_Jabatan_Dinas_Kominfo,Telahaan_Staf_Peningkatan_Kompetensi_SDM., Disposisi Peningkatan Kompetensi SDM, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM, Laporan Pelaksanaan GCIO, Laporan Bimtek Sistem Kapasitas SDM Cloud, Renaksi Pengembangan SDM Tahun dan lain-lain.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih memiliki kelemahan pada indicator Penerapan Manajemen Pengetahuan karena belum memiliki pedoman manajemen pengetahuan.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (Indikator 29, 30, 31)

Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki kekuatan sehingga semua indikator yang meliputi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE harus ditingkatkan.

Kelemahan

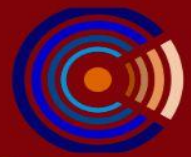
Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layana Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai (Indikator 32-41)

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Layanan Perencanaan,



Layanan Penganggaran Layanan Keuangan sudah menggunakan SIPD. Layanan LPSE sudah ditingkatkan sampai pada pembuatan kebijakan terhadap hasil review. Layanan kepegawaian sudah terintegrasi dengan SIAN. Layanan kearsipan dinamis sudah menggunakan SRIKANDI, layanan pengawasan internal sudah menggunakan aplikasi WBS yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAKDIHATI. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menggunakan aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi secara nasional. Layanan Kinerja Pegawai sudah terintegrasi dengan aplikasi WBS.

Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak memiliki kelemahan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indikator 42-47)

Kekuatan

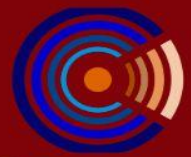
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indikator 42-47) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan SPAN LAPOR, Layanan Data Terbuka menggunakan <https://dota.denpasarkota.go.id> sudah terintegrasi dengan layanan lain, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah terintegrasi dengan JDHIN dengan ada perbaikan fitur terhadap hasil revidi, Sedangkan Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 sudah menggunakan RB Tematik sehingga sudah maksimal.

Kelemahan

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik tidak memiliki kelemahan.

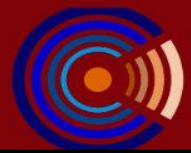
REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Denpasar. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Denpasar, sudah dapat menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra dapat ditingkatkan tingkat kematangannya dengan mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemkot Denpasar dengan Jaringan Intra Pemerintah lainnya. Kebijakan



Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dengan mengatur keterhubungan Sistem Penghubung Layanan Pemkot Denpasar dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah lainnya. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi perlu dijalankan tindak lanjutnya terhadap hasil reviu yang sudah dilakukan. Sedangkan Kebijakan Internal Audit TIK perlu diperbarui reviu dan evaluasinya. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasinya. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Arsitektur SPBE perlu diperbarui reviu dan evaluasinya, Peta Rencana SPBE perlu dijalankan tindak lanjut dari hasil reviu yang sudah dilakukan. Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE perlu dilakukan dengan mengkonsultasikan anggaran SPBE kepada unit TIK. Pemkot Denpasar perlu melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penggunaan SPL perlu adanya Proses Reviu dan Evaluasi secara berkala. Pada Aspek Penyelenggara SPBE, perlu dilaksanakan tindak lanjut berdasarkan reviu dan evaluasinya. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, reviu dan evaluasi yang sesuai dengan substansi indikatornya perlu dilakukan pada indikator Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, kegiatan Audit perlu dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai perlu meningkatkan atau menambah kebijakan terkait layanan atau helpdesk untuk menindaklanjuti hasil reviu yang dilakukan. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah perlu diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, perlu ditingkatkan dengan layanan helpdesk atau perbaikan kebijakan yang mendukung layanan berdasarkan reviu yang dilakukan.



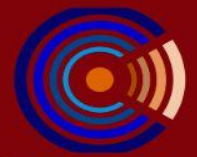


Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

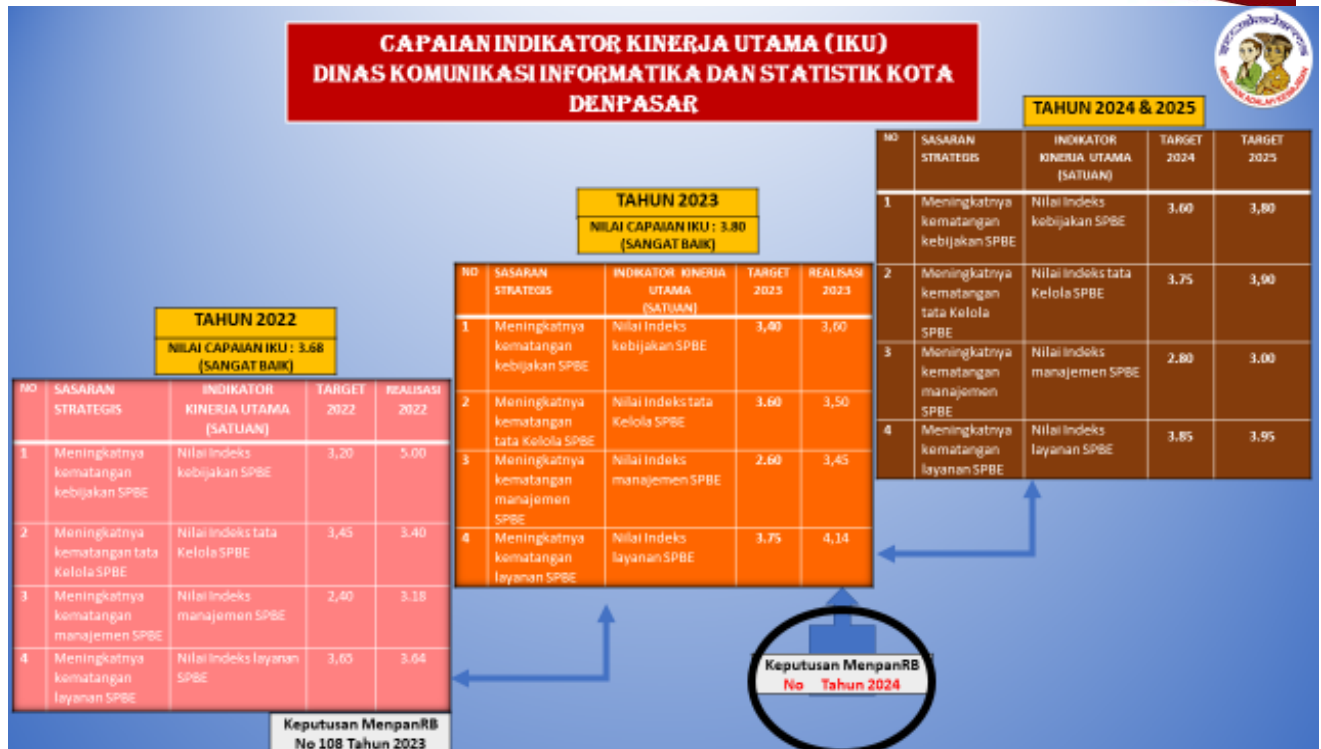
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir;

Realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan capaian kinerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut.

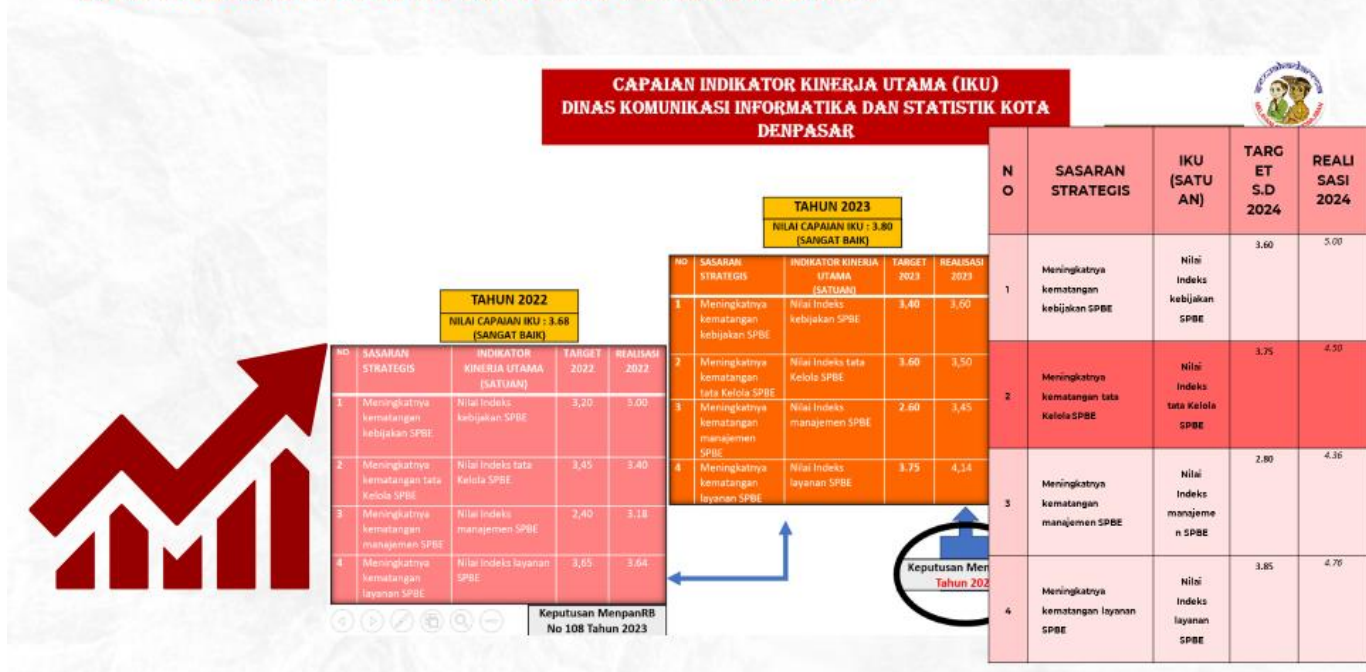
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3,00	3,20	3,40	3,60	3,00	5,00	3,60	4,10
Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3,30	3,45	3,60	3,75	3,30	3,40	3,50	3,90
Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2,18	2,40	2,60	2,80	2,18	3,18	3,45	3,27
Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3,55	3,65	3,75	3,85	3,55	3,64	4,14	4,20



Keterangan :

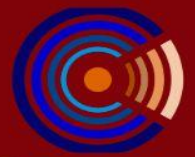


ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

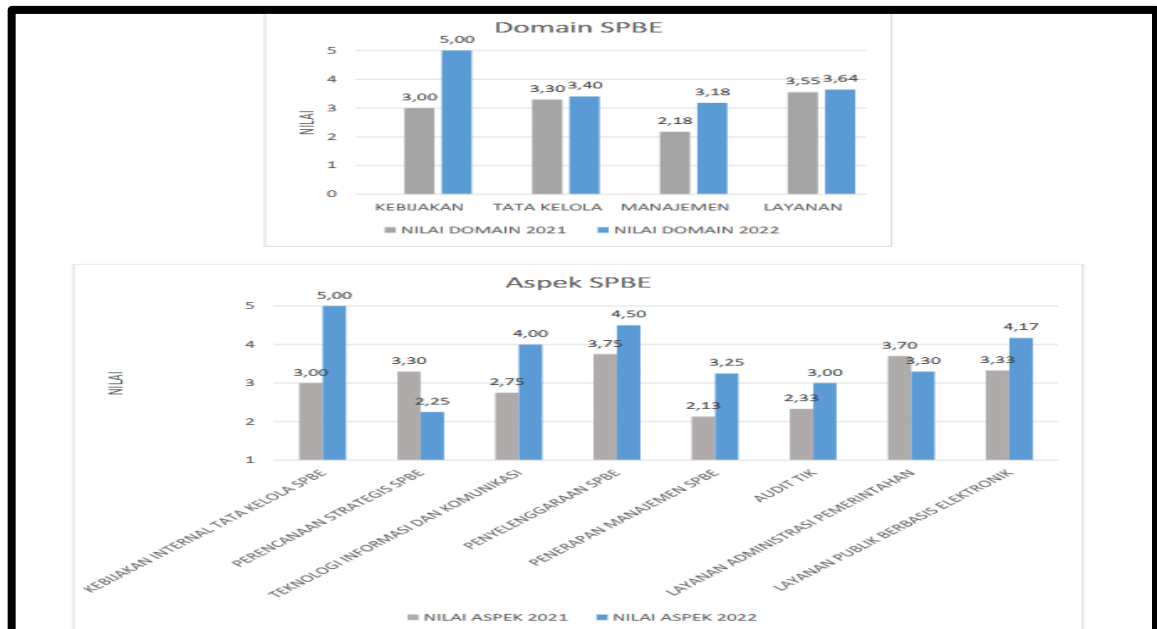


Untuk tahun 2022 Secara umum terjadi peningkatan nilai indeks semula 3,19 dengan predikat Baik menjadi 3,68 dengan predikat Sangat Baik, Adapun capaian domain dan aspek SPBE sebagai berikut:

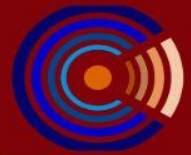
- Dari 8 Aspek SPBE, terdapat 2 aspek mengalami penurunan nilai yaitu aspek Perencanaan Strategis SPBE dan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan.
- Perencanaan Strategis meliputi arsitektur, peta rencana, dan rencana anggaran SPBE. Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada tahun 2021 yang ditetapkan pada Tanggal 3 Januari 2022 dengan Surat Keputusan Walikota Nomor



188.45/89/HK/2022. Namun demikian, secara nasional pedoman Arsitektur dan Peta Rencana SPBE baru ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan batas submit dokumen penilaian tanggal 29 Juli 2022 sehingga penyesuaian dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE mengacu pedoman nasional belum dapat disubmit ke system penilaian. Terkait layanan administrasi pemerintahan



- Terkait Layanan Administrasi Pemerintahan terkendala pada integrasi sistem / aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat, seperti sistem keuangan dan layanan pengadaan barang dan jasa, serta integrasi layanan sistem kepegawaian
- Mengingat status Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kandidat Pemantauan Tambahan Evaluasi SPBE, maka tidak dilaksanakan wawancara / visitasi / harmonisasi sehingga kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait bukti dukung dokumen, memperbaiki dokumen / revisi bukti dukung tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penilaian evaluasi SPBE tahun sebelumnya.
- Saran Tindak :
 - a. Melakukan penyesuaian arsitektur dan peta rencana SPBE mengacu pada pedoman nasional dengan melibatkan seluruh perangkat daerah agar perencanaan anggaran kegiatan SPBE berdasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
 - b. Melibatkan unsur pengelola TIK untuk peningkatan aspek perencanaan strategis SPBE agar rencana anggaran SPBE yang diajukan perangkat daerah mengacu pada Peta Rencana SPBE
 - c. Melaksanakan monev dan menindaklanjuti hasil monev untuk meningkatkan fungsi aplikasi yang dikelola perangkat daerah agar dapat terintegrasi dengan layanan lainnya.

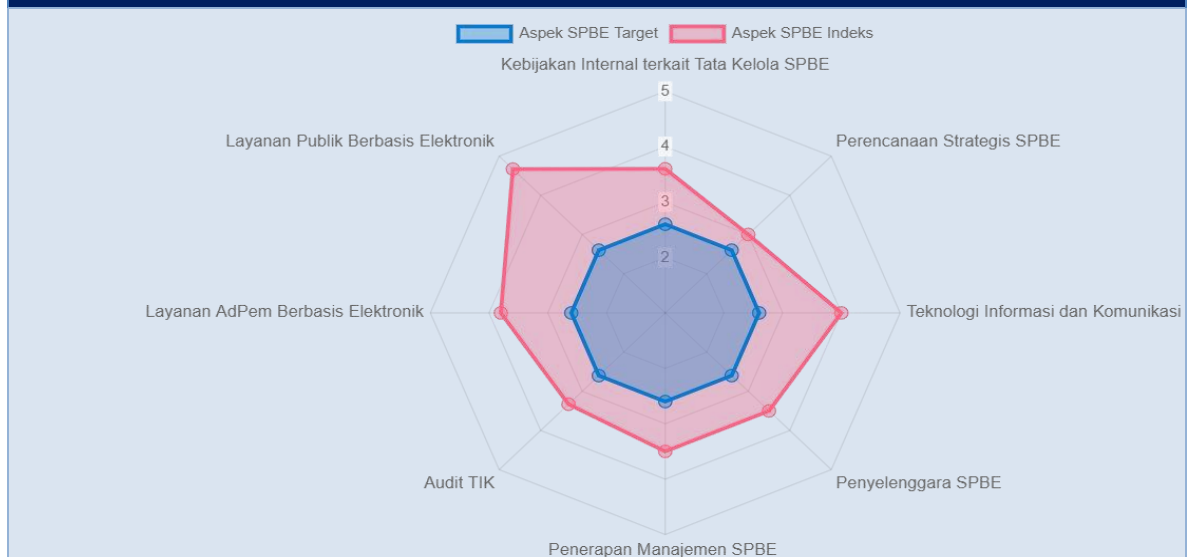


Untuk tahun 2023 :

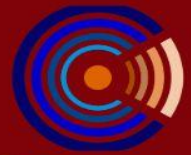
INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA DENPASAR

3,8
(Sangat Baik)

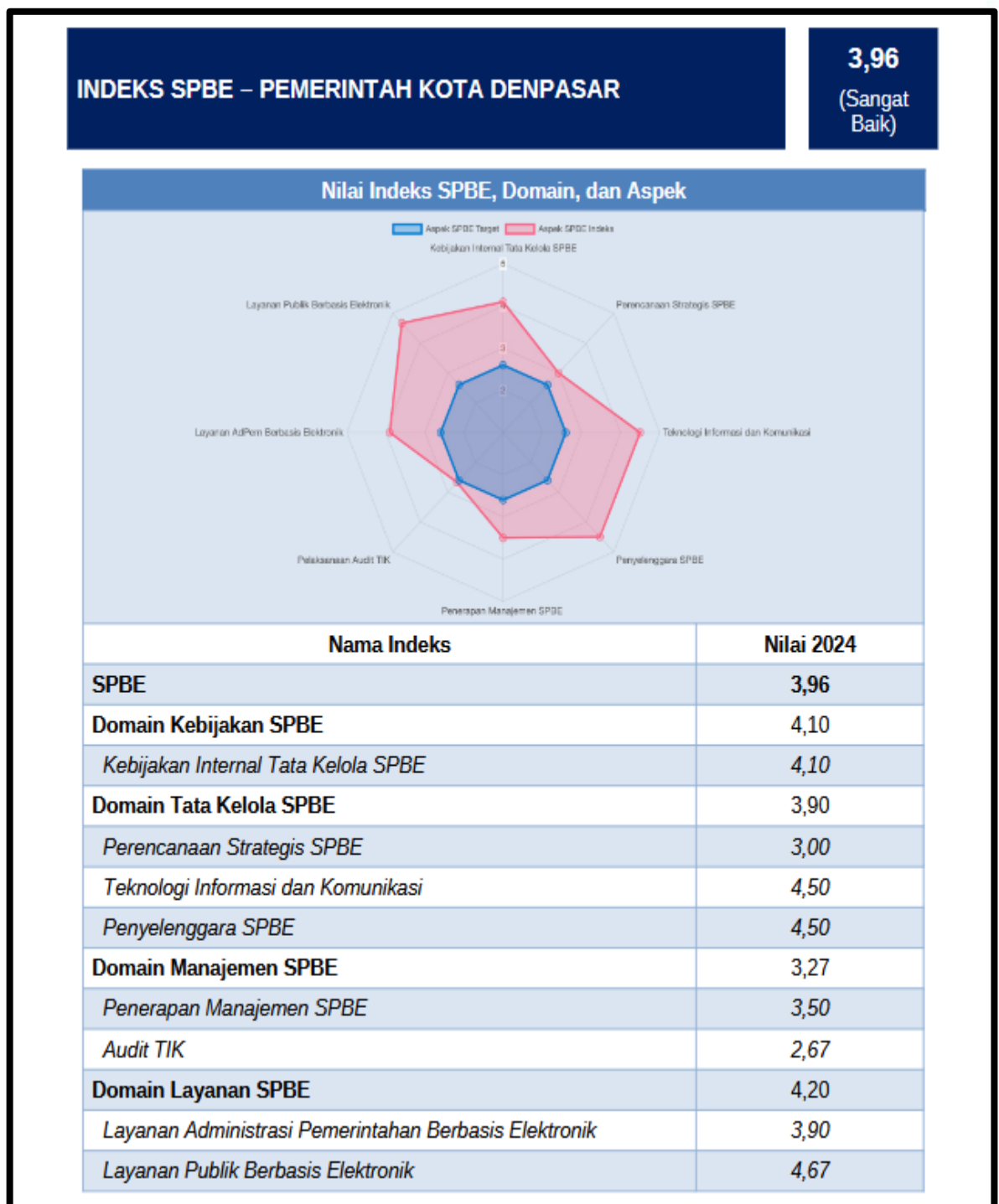
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,8
Domain Kebijakan SPBE	3,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	3,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	3,45
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,50
<i>Audit TIK</i>	3,33
Domain Layanan SPBE	4,14
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,67



Untuk tahun 2024 :



- Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Penjelasan perbandingan realisasi kinerja hingga Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	(TARGET AKHIR TAHUN 2026)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE			
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	113.89%	100%	113.89%
	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	104%	100%	104%
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	116.78%	100%	116.78%
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	109%	100%	109%

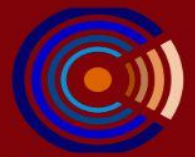
berdasarkan tabel tersebut bahwa ke empat (4) sasaran kinerja diukur atau dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Pada target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, targetnya 100%. sedangkan capaian indikator hingga tahun 2024 sebesar 102.85%. Dengan demikian nilai pencapaiannya telah memenuhi target akhir jangka menengah.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional (jika ada);

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	STANDAR PROVINSI	STANDAR NASIONAL	%CAPAIAN DENGAN PROVINSI	%CAPAIAN DENGAN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.96	4.30	3.12	92%	126%

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI							
NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE					
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60	4,10	113.89%	Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE	Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE
	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75	3,90	104%	Terpenuhinya pelaksanaan tata kelola SPBE	Peningkatan pelaksanaan tata kelola SPBE
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2.80	3,27	116.78%	Terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE	Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85	4,20	109%	Terpenuhinya pelaksanaan layanan SPBE	Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE



Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis kesenjangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yang akan dicapai dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan layanan SPBE. Identifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi feedback untuk rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

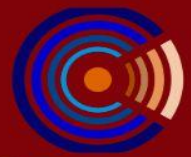
- (1) Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE
- (2) Terpenuhinya pelaksanaan tata kelola SPBE
- (3) Terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE
- (4) Terpenuhinya pelaksanaan layanan SPBE
- (5) Optimalnya Tim Koordinasi SPBE

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

1. Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi.
2. Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan review fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana.
3. Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE
4. Peningkatan pelaksanaan tata kelola SPBE
5. Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE
6. Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran);

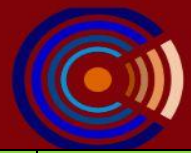
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE						
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	3.60	<i>4,10</i>	113.89%	360491000	257101500	71.32	103389500
	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	3.75	<i>3,90</i>	104%	4706367000	3338309434	70.93	1368057566
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	2.80	<i>3,27</i>	116.78%	246375000	135888700	55.15	110486300
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	3.85	<i>4,20</i>	109%	13806940352	10898539931	78.93	2908400421



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

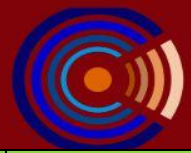
NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE					
	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	113.89%	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		71.32	Menunjang
	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	104%	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		96.82	Menunjang
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik		69.20	Menunjang
				Layanan Hubungan Media		75.70	Menunjang
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		99.71	Menunjang
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		86.51	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		72.59	Menunjang
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		66.26	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Penhubung Layanan Pemerintah		52.77	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		23.47	Menunjang
	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	116.78%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		99.18	Menunjang
				Membangun Metadata Statistik Sektoral		98.43	Menunjang
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		16.37	Menunjang
	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	109%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		71.65	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90.60	Menunjang



				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.46	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.67	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.22	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.96	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.88	Menunjang
					76.52	Menunjang

Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

1	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	360.491.000	257.101.500	71.32
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.750.000	145.950.000	96.82
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	366.576.000	253.680.436	69.20
4	Layanan Hubungan Media	22.350.000	16.920.000	75.70
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	398.921.000	397.775.000	99.71
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	41.150.000	35.600.000	86.51
7	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.982.895.000	2.165.183.998	72.59
8	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	274.000.000	181.550.000	66.26
9	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	107.200.000	56.570.000	52.77
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	362.525.000	85.080.000	23.47
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	51.350.000	50.926.500	99.18
12	Membangun Metadata Statistik Sektoral	64.625.000	63.612.200	98.43
13	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130.400.000	21.350.000	16.37
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.050.343.663	5.767.929.711	71.65
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.684.051.784	4.243.761.930	90.60
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.107.468	129.556.280	82.46

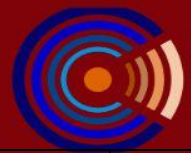


17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.128.150	35.458.100	73.67
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.500.000	116.149.960	74.22
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517.791.836	439.914.550	84.96
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.017.451	165.769.400	85.88
		19.120.173.352	14.629.839.565	76.52

Dari table tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja yang menunjang sasaran strategis adalah sebagai berikut :

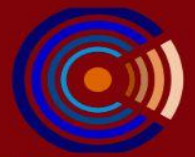
Dalam mencapai sasaran strategis didukung oleh 5 (lima) program 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. **19.120.173.352,00** atau 100% dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **14.629.839.565,00** atau 76.52% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 4,490,333,787,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KERJA	RENCANA 1 TH	SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024				SISA ANGGARAN	
				TARGET		REALISASI			
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Daerah Kabupten/Kota								
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	8.050.343.663	100%	8.050.343.663	100%	5.767.929.711	634.247.847
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	4.684.051.784	100%	4.684.051.784	100%	4.243.761.930	220.268.758
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	157.107.468	100%	157.107.468	100%	129.556.280	11.848.730
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Pengadaan Perangkat Daerah	48.128.150	100%	48.128.150	100%	35.458.100	20.824.602

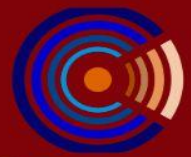


	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.500.000	100%	156.500.000	100%	116.149.960	24.020.164
	3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendara Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	517.791.836	100%	517.791.836	100%	439.914.550	34.846.490
	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	193.017.451	100%	193.017.451	100%	165.769.400	2.030.500
2	4	Program Informasi dan Komunikasi Publik							
		Kegiatan Pengelolaan Informai dan Komunikasi							
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							





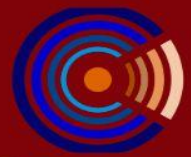
		9	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa Berita dan Video	150.750.000	100%	150.750.000	100%	145.950.000	29.015.000
		10	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Memperoleh Informai Mengenai Pembangunan Daerah Pelayanan Publik lalulintas dan informasi penting lainnya serta Terselenggaranya Bimtek Penyiaran	366.576.000	100%	366.576.000	100%	253.680.436	101.710.998
		11	Layanan Hubungan Media	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Publik melalui Kerjasama Media	22.350.000	100%	22.350.000	100%	16.920.000	9.405.400
		12	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komiikasi Publik	Jumlah pameran pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	398.921.000	100%	398.921.000	100%	397.775.000	2.248.000
		13	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	41.150.000	100%	41.150.000	100%	35.600.000	4.970.000
3			Program Aplikasi Informatika							
	5		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah							
			Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah							
		14	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	2.982.895.000	100%	2.982.895.000	100%	2.165.183.998	399.694.533
	6		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		15	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	274.000.000	100%	274.000.000	100%	181.550.000	100.475.000
		16	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	107.200.000	100%	107.200.000	100%	56.570.000	106.430.000
		17	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Computing	362.525.000	100%	362.525.000	100%	85.080.000	163.211.620
4			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
	7		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							



		18	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam Buku Denpasar Membangun	51.350.000	100%	51.350.000	100%	50.926.500	423.500
		19	Membangun Metadata Statistik Sektoral		64.625.000	100%	64.625.000	100%	63.612.200	
5		8	Program Penyelenggaraan Persandian untuk							
			Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah							
			Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman							
			Informasi Pemerintah Daerah							
		20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Mobile Jumlah Audit Sistem Informasi Jumlah Pelatihan dasar Keamanan Informasi	130.400.000	100%	130.400.000	100%	21.350.000	3.200.000
TOTAL					19.120.173.352	100%	19.120.173.352	100%	14.629.839.565	4.490.333.787

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE
indikator : Nilai Indeks kebijakan SPBE
Dalam menunjang sasaran strategis 1 ”*Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE*” ini dilaksanakan dengan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, program ini diwujudkan dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE
indikator : Nilai Indeks Tata Kelola SPBE
Dalam menunjang sasaran strategis 2 ” *Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE*” ini dilaksanakan dengan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE
indikator : Nilai Indeks Manajemen SPBE
Dalam menunjang sasaran strategis ” *Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE*” ini dilaksanakan dengan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA,



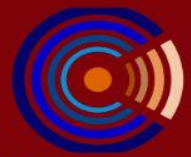
program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE
indikator : Nilai Indeks layanan SPBE

Dalam menunjang sasaran strategis ” *Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE*” ini dilaksanakan dengan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI program ini diwujudkan dengan Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran strategis :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,806,940,352.00	10,898,539,931.00	78.94%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	979,747,000.00	849,925,436.00	86.75%
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4,087,111,000.00	2,745,485,498.00	67.17%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	115,975,000.00	114,538,700.00	98.76%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	130,400,000.00	21,350,000.00	16.37%
		19,120,173,352.00	14,629,839,565.00	76.52%

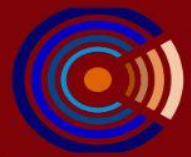


**TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks Kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00	Nilai pembobotan domain 1: Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatkan kematangan Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata kelola SPBE	-	3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 2: Tata Kelola SPBE
3	Meningkatkan kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20	Nilai pembobotan domain 3: Manajemen SPBE
4	Meningkatkan kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 4: Layanan SPBE

**CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR**

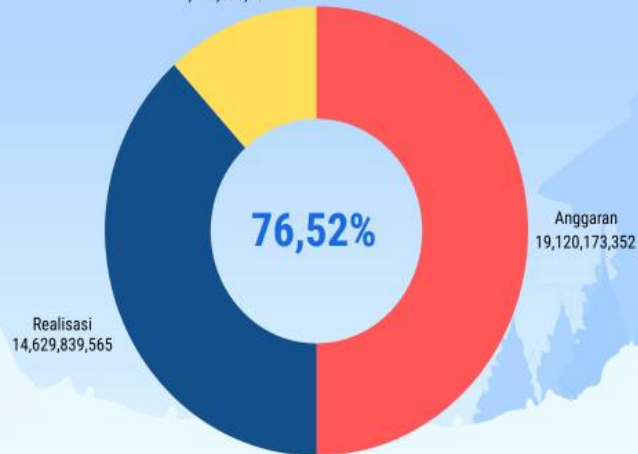
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target			Capaian		Kondisi Akhir Tahun 2026
				2023	2024	2025	2023	2024	
1	Indeks SPBE	Nilai Indeks Domain SPBE	-	3,60	3,80	4,00	3,80	3,95	4,00



REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

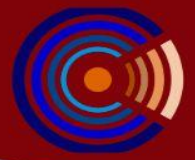
■ Anggaran
 ■ Realisasi
 ■ Sisa Anggaran

Sisa Anggaran
 4,490,333,787



EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	RENCANA TARGET KINERJA TAHUN 2026	KETERANGAN
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	16 KIM	4 KIM	20 KIM	25 KIM	25 KIM	
2	Persentase Organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase layanan SPBE	90%	100%	95%	100%	100%	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	40%		50%	60%	60%	



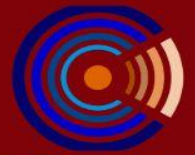
LAYANAN KOMINFOS

 www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1 PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- 2 TALKSHOW/REPORTASE DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
- 3 PEMBUATAN VIDEO LIPUTAN ATAUPUN KONTEN DIGITAL
- 4 MOBIL CALLING
- 5 LED VIDEOTRON
- 6 WEBSITE





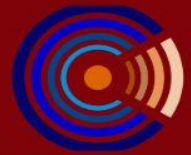
MEDIA SOSIAL

Sosialisasi Program-program kegiatan yang publikasikan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) yang dikemas ke dalam bentuk Info Grafis yang terintegrasi pada website diskominfos.



FASILITASI SOUND SYSTEM





PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1 STANDARISASI PENGEMBANGAN APLIKASI
- 2 STANDARISASI PERANGKAT KERAS
- 3 TERSEDIAANYA SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH PENGKOT DENPASAR
- 4 TERSEDIAANYA LAYANAN HOSTING SERVER CLOUD, VPN DAN SERVER DEDICATED
- 5 TERSEDIAANNYA BANDWIDTH INTERNET DI SELURUH PERANGKAT DAERAH PEMKOT DENPASAR
- 6 TERSEDIAANNYA VIDEO CONFERENCE DI PERANGKAT DAERAH
- 7 TERSEDIAANNYA VIDEO CONFERENCE DI PERANGKAT DAERAH



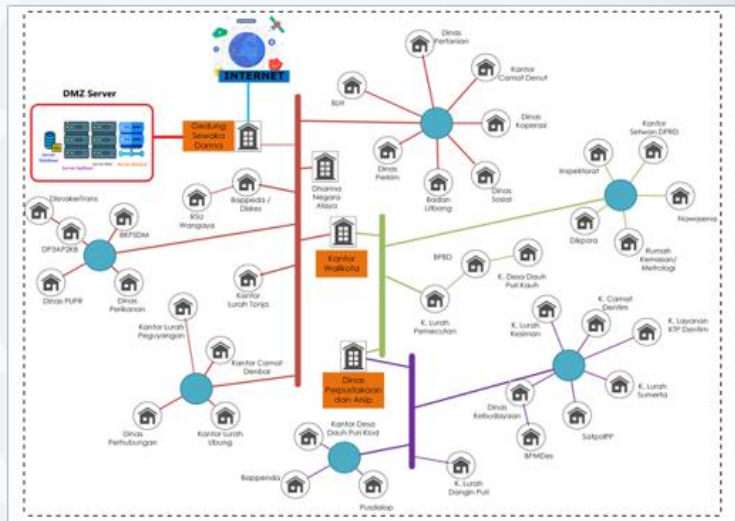
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK

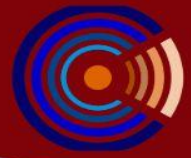
KONDISI INTERKONEKSI PRIVTE NETWORK

1. TERINTEGRASI DENGAN PUSAT DATA

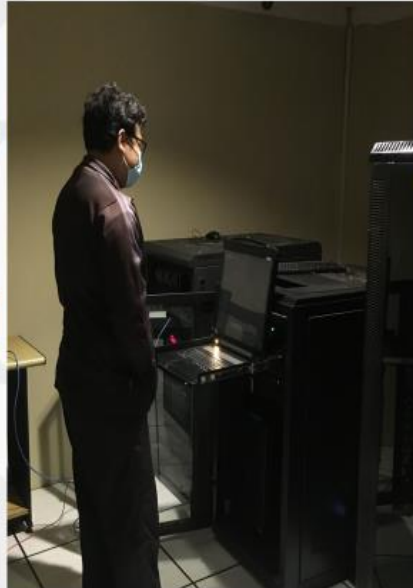
- a. JALUR FO LANGSUNG :
- b. JALUR METROLINK :

2. JARINGN BELUM TERINTEGRASI :





PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK



LAYANAN FREE WIFI DI KOTA DENPASAR

Bagi Desa Adat, Puskesmas dan Obyek Wisata (Melalui Dana BKK Provinsi)

- 1 Penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optic hingga ke pelosok desa, puskesmas dan obyek wisata
- 2 Membuka akses informasi tentang teknologi bagi masyarakat dan wisatawan
- 3 Mendukung Konsep Smart City/Kota Pintar yang terhubung secara digital demi terciptanya kota pintar yang inklusif dan berkelanjutan
- 4 Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendukung perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat, menjadikan kota ini lebih modern dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

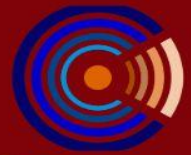
75 Titik Akses Wifi Bali Smart Island di Kota Denpasar



Keterangan:

- Desa Adat Pakraman
- Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
- Obyek Wisata dan Fasilitas Umum

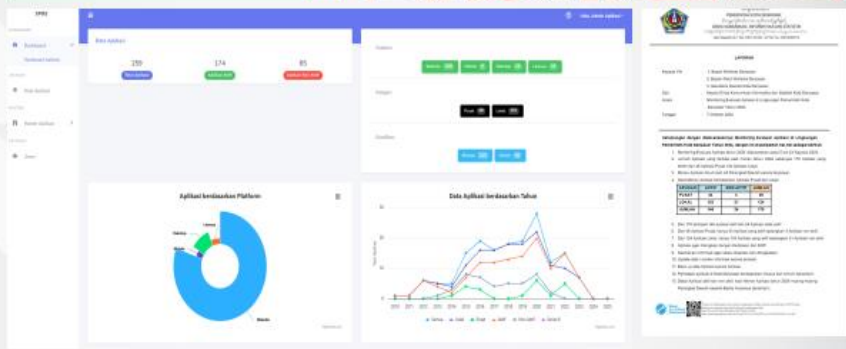
No	Lokasi Pemasangan	Jumlah Titik
1	Desa Adat Pakraman	35
2	Puskesmas	21
3	Objek Wisata dan Fasilitas Umum	19



KEGIATAN MONITORING EVALUASI APLIKASI

Monev Aplikasi di Kota Denpasar sangatlah penting untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pelayanan publik berjalan dengan baik. Dengan monev, pemerintah bisa memantau apakah aplikasi tersebut membantu masyarakat, efisien, dan mudah digunakan.

Selain itu, monev juga membantu memperbaiki aplikasi yang masih kurang baik, agar layanan publik semakin berkualitas. Ini juga membuat pemerintah lebih transparan dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang ada. Dengan begitu, teknologi yang digunakan bisa terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat Kota Denpasar.



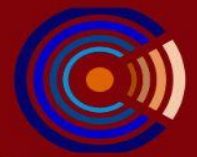
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1 LAYANAN DATA SEKTORAL

Untuk dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, perlu didukung dengan data sektoral dan informasi yang akurat.

Data sektoral dan informasi ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga pembangunan daerah menjadi tepat sasaran, guna meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat





PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

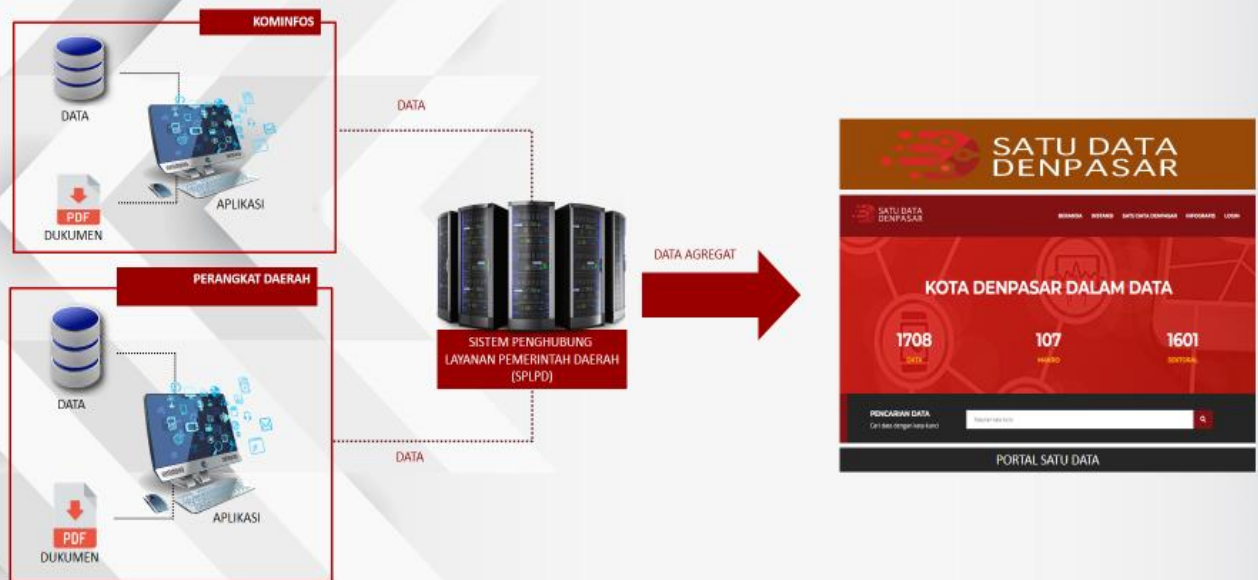
1 LAYANAN DATA SEKTORAL

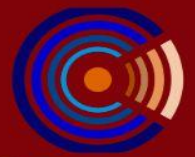
Untuk dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, perlu didukung dengan data sektoral dan informasi yang akurat.

Data sektoral dan informasi ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga pembangunan daerah menjadi tepat sasaran, guna meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat



ARSITEKTUR INTEROPERABILITAS SATU DATA





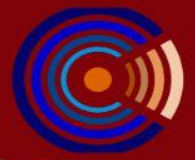
KEGIATAN KAMIS STATISTIK



KAMIS STATISTIK

BUKU DENPASAR MEMBANGUN





DENPASAR PEKAN STATISTIK



Tim DPS
Dinas Kominfo & BPS Kota Denpasar



Denpasar Pekan Statistik

Denpasar Pekan Statistik atau disingkat dengan DPS adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Statistik Nasional (HSN). DPS bertujuan untuk mempererat jalinan koordinasi, sinergi dan evaluasi penyelenggaraan statistik di Kota Denpasar serta kabupaten penyangga demi mewujudkan Satu Data Indonesia.



Pencanangan Desa Dangin Puri Kangin sebagai Desa Cantik Kota Denpasar tahun



Pelatihan Agen Statistik Desa Kelurahan Kota Denpasar



Seminar Pokok Statistik "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Statistik Berkualitas"



Seminar Inflasi bersama Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)



Coaching Metode Penelitian

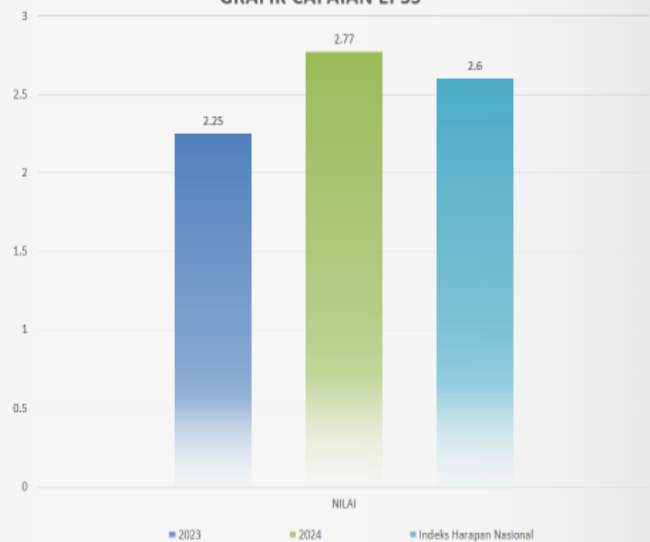
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

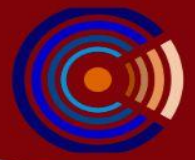
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Denpasar tahun 2024 adalah 2,77 dengan predikat Baik

GRAFIK CAPAIAN EPSS





PEMBINAAN METADATA STATISTIK SEKTORAL



Pelatihan Metadata Statistik Sektoral Menyasar Produsen Data di Kota Denpasar yang terdiri dari 47 Perangkat Daerah dan 43 Desa Kelurahan

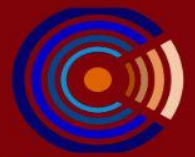


KONSULTASI METADATA STATISTIK SEKTORAL



Diskominfos Kota Denpasar, selaku walidata menyediakan fasilitas konsultasi bagi produsen data dalam rangka penyusunan Metadata Statistik Sektoral. Fasilitas ini bertujuan untuk memfasilitasi produsen data dalam menyusun metadata yang tepat dan akurat, guna mendukung pengelolaan data statistik yang lebih baik.





PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI

1 LAYANAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK INDIVIDU

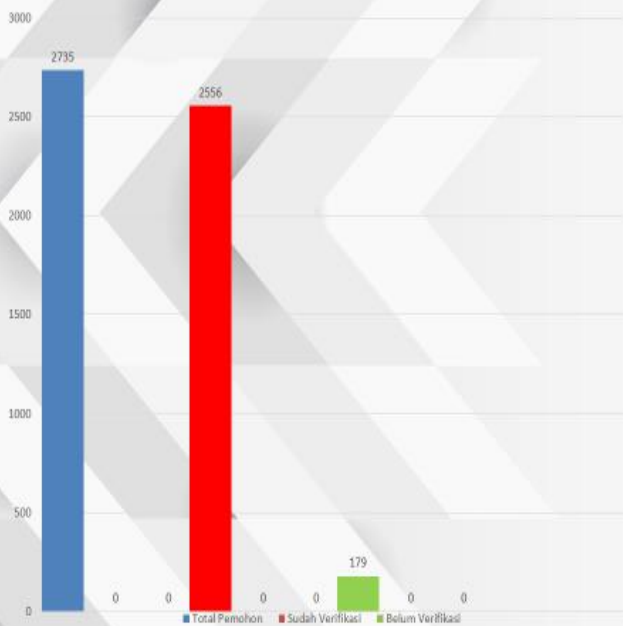
2 LAYANAN, PENERBITAN, PEMBAHARUAN SERTA PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pelayanan sertifikat elektronik di Dinas Kominfo Kota Denpasar merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang mudah, cepat, dan aman.

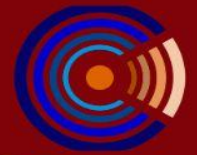
Hal ini sejalan dengan visi Kota Denpasar yang ingin menjadi kota cerdas (smart city), di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.



PENDAMPINGAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



Pendampingan Pelaksanaan Sertifikat Elektronik telah dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan keterangan selama Tahun 2024, Total Pemohon 2735 Orang, dengan keterangan yang sudah terverifikasi sebanyak 2556 pemohon dan 179 belum terverifikasi.



PENDAMPINGAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1.2 Pendampingan pelaksanaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	51	51	0
2	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	33	32	1
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	40	40	0
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	25	25	0
Total		137	132	5

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Dinas Perencanaan Kota Denpasar	91	90	1
2	Dinas Perencana Kota Denpasar	32	32	0
3	Dinas Perencanaan dan Kebijakan Kota Denpasar	100	100	0
Total		123	122	1

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	ISD Wilayah Kota Denpasar	28	28	0
2	Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	24	23	1
3	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	100	28	72
4	Dinas Perencanaan, Kearsafan Perencanaan dan Partisipasi Kota Denpasar	28	27	1
5	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	137	62	75
6	Caraka Denpasar Barat	28	28	0
7	Dinas Keperawatan Kota Denpasar	28	28	0
Total		388	272	116

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	50	48	2
2	Caraka Denpasar Utara Kota Denpasar	28	27	1
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	26	25	1
4	Dinas Penanaman Modal Kota Denpasar	80	82	0
5	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	112	118	0
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia	12	12	0
7	Caraka Denpasar Selatan Kota Denpasar	12	12	0
8	Dinas Sains Kota Denpasar	30	29	1
9	DMPP Kota Denpasar	1	1	0
10	DMPP Kota Denpasar	351	350	1
Total		682	682	0

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Bagian Kerja Sama Kota Denpasar	16	9	7
2	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	9	9	0
3	Badan Keuangan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	24	22	2
4	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	7	7	0
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	10	17	1
6	DMPP Kota Denpasar	10	10	0
7	Caraka Denpasar Timur	12	12	0
8	Dinas Perencanaan dan Kebijakan Kota Denpasar	10	10	0
9	Dinas Perencanaan dan Kebijakan Kota Denpasar	10	10	0
Total		139	135	4

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Dinas Perencanaan dan Pengembangan Peta Kelangka Berencana Kota Denpasar	37	31	6
2	MS Wilayah Kota Denpasar (Sesi 2)	82	75	7
3	MSR Kota Denpasar	112	108	4
4	Phisologi Setda Kota Denpasar	18	18	0
5	Malakukan Sertifikat Denpasar Selatan	7	6	1
6	Dinas Perencanaan dan Kebijakan Kota Denpasar	48	48	0
7	Malakukan Toraja	12	11	1
8	Dinas Perencanaan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	58	57	1
Total		362	360	2

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Kelurahan Selat	7	7	0
2	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	6	6	0
3	DMPP Kota Denpasar	43	42	1
4	DMPP Perencanaan dan Kebijakan Kota Denpasar	41	40	1
5	Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kota Denpasar	11	11	0
6	Malakukan Sertifikat Puri	0	0	0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	5	5	0
8	Malakukan Sumerta	0	0	0
9	Malakukan Rerona	10	9	1
10	DMPP Kota Denpasar	20	9	11
11	Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kota Denpasar (Sesi 2)	95	93	2
Total		248	238	10

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Dinas Kewilayatan Kota Denpasar	250	235	15
2	Malakukan Serangan	0	0	0
Total		250	235	15

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Malakukan Pagarwings	10	10	0
2	Malakukan Ubung	9	9	0
Total		19	19	0

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Malakukan Peranti	6	6	0
2	Bagian Ekonomi	11	10	1
3	DMPP Kota Denpasar	1	1	0
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kota Denpasar	191	177	14
Total		219	194	25

NO	NAMA OPD	TOTAL PEMOHON	SUDAH VERIFIKASI	BELUM VERIFIKASI
1	Kelurahan Jati	48	41	7
2	Kelurahan Petegungan	6	6	0
3	Inspektoral	77	65	12
4	Kelurahan Pangeran	8	8	0
5	Bagian Kelangka	7	6	1
6	Kelurahan Padangsambian	7	7	0
Total		153	134	19

TOTAL KESELURUHAN	2735	2556	179
-------------------	------	------	-----

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY ASSESSMENT (ITSA)

PERANGKAT DAERAH

Bagian Hukum Setda Kota Denpasar

APLIKASI

Aplikasi JDJH Kota Denpasar

WAKTU PELAKSANAAN ITSA

Pelaksanaan ITSA dilakukan pada tanggal 15 s/d 19 Juli 2024

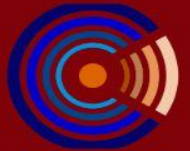
REKOMENDASI

- Melakukan perbaikan pada sistem elektronik sesuai dengan rekomendasi dari hasil ITSA guna remediasi.
- Melakukan *vulnerability assessment dan security assessment secara berkala* pada sistem elektronik yang dimiliki dan dikelola.
- Menambahkan perangkat perimeter keamanan (*Firewall, WAF, IDS/IPS*) untuk meningkatkan ketahanan sistem dari serangan.
- Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi personel pengelola sistem elektronik khususnya di bidang keamanan jaringan, server, dan aplikasi.
- Terus berkoordinasi dengan BSSN khususnya dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat/Daerah terkait keamanan sistem elektronik yang dimiliki dan dikelola.

Ringkasan Temuan Kerentanan

No.	Nama Kerentanan	Severity
1.	Insecure Direct Object References (IDOR)	Critical
2.	Stored XSS	Medium
3.	Weak Password Policy	Low





LITERASI KEAMANAN INFORMASI



MEDIA PENYIARAN



SOSIALISASI



MEDIA SOSIAL



LAPORAN SERANGAN SIBER TAHUN 2024



LAPORAN

Kepada Yth : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Sekeloa Dinas - Komunkasi, Informatika dan Statistik
 Dari : Kepala Bidang Penanganan (Tim DEMPUSAR CSIRT)
 Hari/tanggal : Rabu, 20 Januari 2024
 Perihal : Serangan Malware pada aplikasi e-Aminia Kota Denpasar
 (Efas.indonesia@arsasoftika)

Terkait Serangan Malware pada aplikasi e-Aminia (https://www.eaminia.go.id) Kota Denpasar dapat kita laporan sebagai berikut:

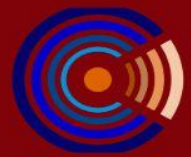
- Kronologi serangan dan bentuk kerusakannya
 - Malware Kejadiannya : 17 Januari 2024
 - Informasi dari Tim Service dan aplikasi Serangan beresaksi pertama kali pada tanggal 13/01/2024 jam 7 pagi, serangan terlihat dari log website
 - serangan awal mengakibatkan halaman tidak dapat diakses, tidak dapat diakses
 - malware dilakukan pengujian awal dan ketika masuk ke dalam server memang benar terkena serangan dan ada beberapa file malware di dalamnya
 - pada tanggal 17/01 web halaman serangan kembali, dimana timker mendapat informasi bahwa web diinvasi dan melakukan redirect ke web-kota Denpasar halaman detail video tentang aplikasi e-aminia

Demikian Laporan dokumentasi serangan di aplikasi e-aminia

Demikian kami sampaikan jika perhalatannya disampaikan terima kasih.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,806,940,352.00	10,898,539,931.00	78.94%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	979,747,000.00	849,925,436.00	86.75%
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4,087,111,000.00	2,745,485,498.00	67.17%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	115,975,000.00	114,538,700.00	98.76%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	130,400,000.00	21,350,000.00	16.37%
		19,120,173,352.00	14,629,839,565.00	76.52%

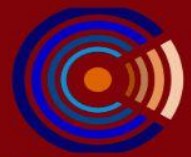
Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang memangku urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi atau capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 diwujudkan melalui 5 program dan 8 kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing - masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19,120,173,352.00 dengan realisasi Rp. 14,629,839,565.00 atau (76.52 %).

a. Program

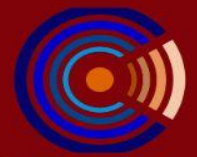
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

b. Kegiatan / Sub Kegiatan

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan



- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 5. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 6. Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 7. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- 8. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :

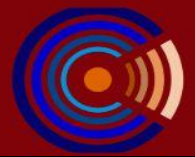
Tabel 7

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KERJA	RENCANA 1 TH	SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024				SISA ANGGARAN
				TARGET		REALISASI		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.050.343.663	100%	8.050.343.663	100%	5.767.929.711	634.247.847
	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.684.051.784	100%	4.684.051.784	100%	4.243.761.930	220.268.758
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.107.468	100%	157.107.468	100%	129.556.280	11.848.730
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	48.128.150	100%	48.128.150	100%	35.458.100	20.824.602
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.500.000	100%	156.500.000	100%	116.149.960	24.020.164
	3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	517.791.836	100%	517.791.836	100%	439.914.550	34.846.490

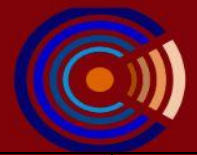


		7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	193.017.451	100%	193.017.451	100%	165.769.400	2.030.500
2		4	Program Informasi dan Komunikasi Publik							
			Kegiatan Pengelolaan Informai dan Komunikasi							
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							



		9	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa Berita dan Video	150.750.000	100%	150.750.000	100%	145.950.000	29.015.000
		10	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Memperoleh Informasi Mengenai Pembangunan Daerah Pelayanan Publik lalu lintas dan informasi penting lainnya serta Terselenggaranya Bimtek Penyiaran	366.576.000	100%	366.576.000	100%	253.680.436	101.710.998
		11	Layanan Hubungan Media	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Publik melalui Kerjasama Media	22.350.000	100%	22.350.000	100%	16.920.000	9.405.400
		12	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pameran pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	398.921.000	100%	398.921.000	100%	397.775.000	2.248.000
		13	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	41.150.000	100%	41.150.000	100%	35.600.000	4.970.000
3			Program Aplikasi Informatika							
	5		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah							
			Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah							
		14	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	2.982.895.000	100%	2.982.895.000	100%	2.165.183.998	399.694.533
	6		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		15	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	274.000.000	100%	274.000.000	100%	181.550.000	100.475.000
		16	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	107.200.000	100%	107.200.000	100%	56.570.000	106.430.000
		17	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Computing	362.525.000	100%	362.525.000	100%	85.080.000	163.211.620
4			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
	7		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							

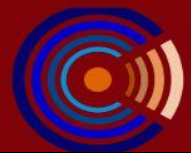




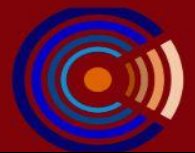
	18	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam Buku Denpasar Membangun	51.350.000	100%	51.350.000	100%	50.926.500	423.500
	19	Membangun Metadata Statistik Sektoral		64.625.000	100%	64.625.000	100%	63.612.200	
5	8	Program Penyelenggaraan Persandian untuk							
		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah							
		Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman							
		Informasi Pemerintah Daerah							
	20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Mobile Jumlah Audit Sistem Informasi Jumlah Pelatihan dasar Keamanan Informasi	130.400.000	100%	130.400.000	100%	21.350.000	3.200.000
TOTAL				19.120.173.352	100%	19.120.173.352	100%	14.629.839.565	2.118.899.970

C. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2024

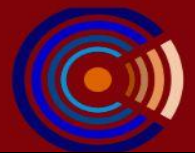
NO	REKOMENDASI	"Rencana Aksi Tindak Lanjut"	"Rencana Waktu Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut"	"Rencana Target Pelaksanaan Aksi Tindak Lanjut"	Penanggung Jawab	Status Pelaksanaan	Keterangan Tambahan
1	Menyajikan informasi mengenai perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan (tahun n) dengan capaian realisasi tahun sebelumnya (tahun n-1) dan capaian realisasi dua tahun sebelumnya (tahun n-2) dalam laporan kinerja	Melakukan penyusunan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024) dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) dan capaian realisasi dua tahun sebelumnya (tahun 2022) dalam laporan kinerja	"Rencana waktu dilaksanakannya rencana aksi tersebut yaitu :Bulan Juli /Triwulan III/tahun 2024 "	"Rencana target dari lama pelaksanaan rencana aksi tersebut yaitu : 2 bulan (Juli s/d Agustus 2024 "	Kepala Dinas Kominfos Kota Denpasar, berkolaborasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kota Denpasar	<i>Sudah Dilaksanakan, Rencana aksi tindak lanjut tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan rencana waktu pelaksanaan aksi tindak lanjut</i>	"Rencana waktu pelaksanaan aksi tindak lanjut dilakukan bulan Juli 2024 melalui Tahapan Penilaian Mandiri evaluasi SPBE tahun 2024 telah dilaksanakan dan telah dilakukan submit dokumen ke situs pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian PAN RB pada tanggal 15 Agustus 2024, Dari hasil penilaian mandiri evaluasi SPBE tahun 2024, diperoleh nilai Indeks SPBE Tahun 2024 adalah 4.66 dengan predikat memuaskan.



							Adapun target yang dicapai tahun 2024 adalah 3.85 , untuk Tahun 2022 indeks SPBE 3,68 dengan predikat sangat baik. Indeks SPBE sesuai target tahun 2022 mengacu pada RPJMD adalah 3,50 sedangkan untuk tahun 2023 dengan capaian realisasi 3.80 dari target 3.70"
2	Menyajikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran beserta cara perhitungannya dalam laporan kinerja	Menyusun dan menyajikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran beserta cara perhitungannya dalam laporan kinerja	"Rencana waktu dilaksanakannya rencana aksi tersebut yaitu :Bulan Juli /Triwulan III/tahun 2024 "	"Rencana target dari lama pelaksanaan rencana aksi tersebut yaitu : 6 bulan (Juli s/d Desember 2024 "	Kepala Dinas Kominfos Kota Denpasar, PPTK dan Kepala Bidang	"Sudah Dilaksanakan, Rencana aksi tindak lanjut tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan rencana waktu pelaksanaan aksi tindak lanjut"	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfos membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Kominfos Kota Denpasar. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, Pada tahun 2024, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kominfos sebanyak 107 pegawai Dari total pegawai tersebut, 27 pegawai ASN, dan 80 tenaga non ASN, dan diantaranya ada yang telah memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian, Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Dinas Kominfos telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indicator kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target tahun 2024 dalam proses

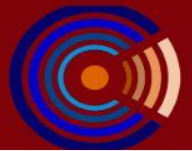


							efisiensi dilakukan melalui proses negosiasi harga dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan pada Dinas Kominfo Kota Denpasar
							Upaya Pelaksanaan efisiensi : Melakukan pemetaan infrastruktur SPBE untuk mengurangi beban sewa peralatan infrastruktur jaringan, melakukan upaya kedepan untuk mengurangi sewa cloud dan mengoptimalkan penggunaan Pusata Data Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, melakukan optimalisasi pendayagunaan SDM yang dimiliki dalam pembangunan aplikasi dibandingkan melalui kerjasama pihak ketiga, mendorong pemanfaatan TTE dalam upaya paperles, dan melakukan efisiensi barang jasa melalui pengadaan barang jasa secara elektronik dengan mengutamakan penggunaan barang produksi dalam negeri.
3	Melakukan upaya pengendalian melalui monev internal berkala yang terdokumentasi terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja,	Melakukan upaya pengendalian internal melalui monev internal berkala yang terdokumentasi terhadap pelaksanaan	"Rencana waktu dilaksanakannya rencana aksi tersebut yaitu :Bulan Oktober /Triwulan IV/tahun 2024 "	"Rencana target dari lama pelaksanaan rencana aksi tersebut yaitu : 3 bulan (Oktober s/d Desember 2024	Kepala Dinas Kominfo Kota Denpasar, PPTK dan Kepala Bidang	<i>Sudah Dilaksanakan, Rencana aksi tindak lanjut tersebut sudah dilaksanakan</i>	Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja,



	pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		"		<i>berdasarkan rencana waktu pelaksanaan aksi tindak lanjut</i>	pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
4	Mendokumentasikan pemantauan rencana aksi serta realisasi tindak lanjut terhadap rekomendasi pada LHE SAKIP	Melakukan pendokumentasian pemantauan rencana aksi serta realisasi tindak lanjut terhadap rekomendasi pada LHE SAKIP	"Rencana waktu dilaksanakannya rencana aksi tersebut yaitu :Bulan Oktober /Triwulan IV/tahun 2024 "	"Rencana target dari lama pelaksanaan rencana aksi tersebut yaitu : 3 bulan (Oktober s/d Desember 2024 "	<i>Kepala Dinas Kominfos Kota Denpasar, PPTK dan Kepala Bidang</i>	<i>"Sudah Dilaksanakan, Rencana aksi tindak lanjut tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan rencana waktu pelaksanaan aksi tindak lanjut"</i>	Tindak lanjut Rekomendasi LHE SAKIP





BENCHMARKING EPSS



DTIK FESTIVAL



Ten DPS
Dinas Kominfo & IPS Kota Denpasar

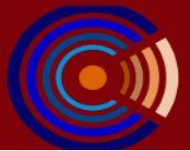


Denpasar Pekan Statistik

Denpasar Pekan Statistik atau di singkat dengan DPS adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Statistik Nasional (HSN). DPS bertujuan untuk mempercepat jalinan koordinasi, sinergi dan evaluasi penyelenggaraan statistik di Kota Denpasar serta kabupaten penyangga demi mewujudkan Satu Data Indonesia.



INOVASI



INOVASI



APLIKASI DPS

Pembaharuan aplikasi Mobile PRO Denpasar+, dengan konsep "demi Denpasar - Denpasar satu", menyatukan seluruh aplikasi mobile yang sudah dimiliki oleh Pemkot Denpasar serta menambahkan fitur yang mampu mempermudah respon cepat dan tanggap aparatur pemerintah terhadap pengaduan online masyarakat.



GEN TIK

Agen Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju percepatan Implementasi Asas SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar, serta untuk mewujudkan Asas SPBE sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.



RADITYA

Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) memberdayakan para penyandang disabilitas sebagai penyiar khusus, memberikan ruang bagi para lansia menyalurkan hobi melalui segmen Gita Sancaya serta bekerjasama dengan kelompok KISARA (Kita Sayang Remaja) untuk mengedukasi remaja perihal seksualitas dan juga permasalahan remaja lainnya.



OPEN DATA KEREN

Tata Kelola Penyelenggaraan Data dan Metadata Statistik Sektoral di Kota Denpasar berbasis KEREN (Kolaboratif, Efektif, Responsif, Efisien dan Normatif)



IDENTIK

Sistem Informasi dengan Tanda Tangan Elektronik yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Denpasar untuk memudahkan proses penandatanganan dokumen oleh pimpinan untuk bisa dilakukan dengan cepat, kapan dan dimana saja secara Elektronik

INOVASI

RADITYA



Inovasi RADITYA Kota Denpasar Sukses Jadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Sambat, 04 Agustus 2023

J. Utami



Denpasar,

Inovasi Kota Denpasar yang dalam hal ini Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya (RADITYA) berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023. Torehan prestasi tersebut berhasil diraih inovasi RADITYA mengikuti seleksi finalis top inovasi pelayanan publik yang terdiri dari top 99 inovasi. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 553 tahun 2023 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023.



RADIO INKLUSI

MENUJU KOTA DENPASAR MAJU DAN JAYA

37,5% PENYIAR DISABILITAS

DARI TOTAL 16 PENYIAR



GITA SANCAYA

SETIAP HARI MINGGU
PUKUL 15.00 S/D 17.00 WITA



- KISARA DINAUNGI PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) BALI
- KONSULTASI REMAJA MELALUI KLINIK CATUR WARGA



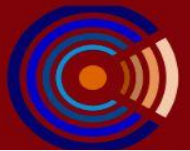
denpasarkota.go.id



@denpasarkota



denpasarkota



INOVASI

LAKON



Tentang LAKON (Layanan Kominfo Online)
 LAKON (Layanan Kominfo Online) merupakan portal yang memberikan informasi dan permohonan layanan secara online sehingga lebih efisien dan berkualitas bagi pengguna, baik dalam mengatasi masalah teknis maupun memberikan panduan terkait produk dan layanan yang disediakan.

PERMOHONAN LAYANAN KOMINFOS SECARA ONLINE

ALUR LAKON



INOVASI

CSIRT



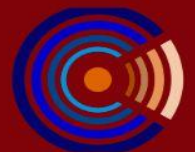
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Jalan Majapahit No. 1 Telp. (0361) 431229 - 437162 Fax. (0361) 84995718

LAPORAN

Kepada Yth. : - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Dari : Kepala Bidang Bessandian (Tim DENPASAR-CSIRT)
 Hari/Tanggal : Senin, 19 November 2022
 Perihal : Serangan SQL Injection pada website <https://jendela.denpasarkota.go.id>

Terkait serangan SQL Injection yang terjadi pada website <https://jendela.denpasarkota.go.id> dapat kami laporkan sebagai berikut:

- Kronologi serangan SQL injection dan temuan kerentanan:
 - Waktu Kejadian : 17 November 2022
 - Laporan dari webmail yang di laporkan oleh akun Wawan Santoso (santososawan123@gmail.com) dimana pelapor menggunakan system penetration test Kali Linux
 - Pertama buka <https://jendela.denpasarkota.go.id> lalu buka https://jendela.denpasarkota.go.id/nim/konten.php?id_menu=19 Untuk melihat kerentanan SQL berbasis kesalahan karakter ' dimasukkan di bagian pencarian. Ditentukan bahwa parameter 'id' menciptakan kerentanan. Basis data dapat diakses dengan alat manual atau otomatis.
 - Bukti dan konsep tersebut di lihat saat pencarian table yang ada pada Database dan melihat isi pada table "USER" pada table user berisikan informasi data Username dan password



INOVASI

DTIK FEST



WALIKOTA DENPASAR DALAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ACARA DTIK FESTIVAL 2024 :

Pameran Teknologi | Pameran Layanan Pemerintah (Inovasi Pelayanan Publik) | Pameran UMKM | workshop dan Seminar | Beragam Lomba | Kuliner dan Hiburan



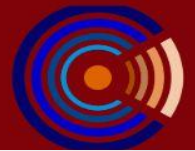
DENPASAR TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (DTIK FEST)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PRESTASI YANG DIPEROLEH

www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id



PENGHARGAAN



AMH (ANUGERAH MEDIA HUMAS)



TOP DIGITAL AWARDS IT'WORK



IDENTIK MOBILE



DENPASAR-CSIRT

PENGHARGAAN

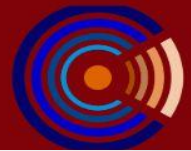


WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)



GENDER EQUALITY AWARD





PENGHARGAAN



10 BESAR INDEKS SPBE TERBAIK KOTA SE-INDONESIA

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan IMDI Kategori Sangat Tinggi Dari Kemkominfo RI

Selasa, 10 September 2024

/Umum



KOMINFOS KEREN



Kolaboratif, Efektif, Responsif, Efisien, akuNtabel



KOLABORATIF

KOLABORASI SELURUH PERANGKAT DAERAH SESUAI INDIKATOR SPBE



EFEKTIF

PENERAPAN IDENTIK SEBAGAI PORTAL TTE



RESPONSIF

SISTEM PENGADUAN



EFISIEN

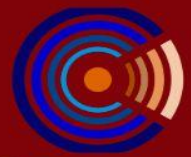
CLOUD SYSTEM DAN DIVOS



AKUNTABEL

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT TIK





BAB IV PENUTUP

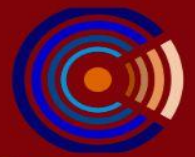
4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain menjadi media atau alat komunikasi pertanggungjawaban berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban LKjIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. LKjIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Hal tersebut dapat diukur dari Hasil Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengembangkan terobosan yang bersifat Inovasi yang terkait dengan informasi dan Komunikasi dengan pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60	4,10
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75	3,90
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2.80	3,27
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85	4,20

Sedangkan kalau ditinjau dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19,120,173,352.00 dengan realisasi Rp. 14,629,839,565.00 penyerapan anggaran mencapai 76.52%. Kedepannya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan berupaya untuk meningkatkan Kinerja sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.



Saran

Upaya yang dilakukan agar meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan tujuan organisasi.
2. Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam peningkatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Denpasar, 3 Pebruari 2025

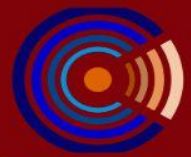
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 197801281996121003



LAMPIRAN :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Denpasar, 19 Agustus 2024

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

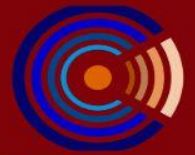
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 197801281996121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	3.60
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	3.75
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	2.80
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	3.85

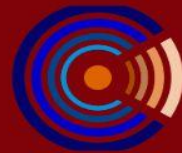
NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.806.940.352	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	979.747.000	
3	Program Aplikasi Informatika	4.087.111.000	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.975.000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	130.400.000	
		19.120.173.352	

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara

Denpasar, 19 Agustus 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 197801281996121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Pihak Kedua,

WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara

Denpasar, 9 Januari 2024

Pihak Pertama,

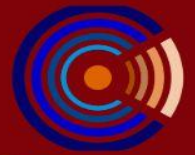
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 197801281996121003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai Indeks domain SPBE	3,85

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.232.379.858	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	975.271.000	
3	Program Aplikasi Informatika	3.545.620.000	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	112.650.000	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	128.900.000	
		14.994.820.858	

Denpasar, 9 Januari 2024

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Denpasar

Pihak Kedua,

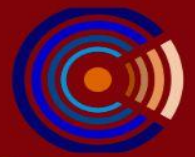
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 197801281996121003



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR
PERIODE 2021- 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Thn 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE		3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00	Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE		3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE		2,18	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20	Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE		3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	4,05	4,05	Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE



